



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2005 – 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2009**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Landasan Hukum	4
I.4. Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
I.4. Sistematika Penulisan	5

BAB II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

II.1. Kondisi dan Analisis.	7
II.1.1. Geografis	7
II.1.2. Demografis	8
II.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam.....	9
II.1.3.1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	9
II.1.3.2. Pendapatan Regional Perkapita.....	10
II.1.3.3. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	10
II.1.3.4. Peternakan dan Perikanan	16
II.1.3.5. Perkebunan dan Kehutanan	18
II.1.3.6. Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan.....	20
II.1.3.7. Koperasi, UMKM, dan Penanaman Modal.....	21
II.1.4. Sosial Budaya.....	23
II.1.4.1. Pendidikan.....	23
II.1.4.2. Kesehatan	24
II.1.4.3. Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	26
II.1.4.4. Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial	27
II.1.4.5. Pemberdayaan Perempuan.....	28
II.1.4.6. Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	29
II.1.4.7. Persatuan dan Kesatuan Bangsa	29
II.1.4.8. Pemerintahan	29
II.1.4.9. Hukum	32
II.1.4.10. Agama	33



II.1.5. Sarana dan Prasarana.....	35
II.1.5.1. Perhubungan dan Pariwisata.....	35
II.1.5.2. Pos dan Telekomunikasi.....	36
II.1.5.3. Listrik dan Air Minum	37
II.1.5.4. Perhubungan (Jalan/Jembatan)	39
II.1.5.5. Perumahan dan Permukiman	40
II.1.5.6. Lingkungan Hidup.....	40
II.1.5.7. Kebersihan dan Pertamanan	40
II.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah	41
II.2.1. Perekonomian Daerah.....	41
II.2.2. Sosial Budaya	46
II.2.2.1. Pendidikan.....	46
II.2.2.2. Kesehatan	51
II.2.2.3. Tenaga Kerja	52
II.2.2.4. Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial	52
II.2.2.5. Pemerintahan	53
II.2.2.6. Hukum	54
II.2.2.7. Agama	54
II.2.3. Prasarana dan Sarana.....	55

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

III.1. Visi	57
III.2. Misi.....	59
III.3. Arah Pembangunan Daerah	60

BAB IV PENUTUP	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

- 1) Kabupaten Aceh Tengah secara resmi dikukuhkan pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, tepatnya 11 tahun setelah Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Meskipun demikian, wilayah Aceh Tengah sebenarnya telah berkembang sejak zaman Belanda (tahun 1904-1942). Pada zaman itu wilayah Takengon (*Onder Afdeeling Nordhus Atjeh*) menetapkan Sigli sebagai ibukotanya. *Onder Afdeeling* Takengon yang ibu negeri Takengon pada saat itu terdiri atas empat negeri (*Landscap*) yaitu : (1) *Landscap* Bukit dengan ibukotanya Mampak, (2) *Landscap* Linge dengan ibukotanya Isaq, (3) *Landscap* Syiah Utama dengan ibukotanya Nosar, dan (4) *Landscap* Cik dengan ibukotanya Kemili.
- 2) Berakhirnya masa pendudukan Belanda berlanjut dengan masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942-1945. Pada masa ini, pembagian wilayah tidak berubah sebagaimana masa pendudukan Belanda. Jepang hanya mengganti istilah-istilah Belanda seperti (1) *Onder Afdeeling* menjadi *Gun*, yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan *Gunco*, (2) *Landscap* diubah menjadi *Sun* yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan *Sunco*. Setelah Indonesia merdeka, istilah *Gun* dan *Sun* diubah kembali dengan sebutan wilayah, yang kemudian diubah kembali dengan nama kabupaten yang terdiri atas beberapa Kewedanaan. *Sun* diubah menjadi negeri yang kemudian diganti lagi dengan sebutan kecamatan. Perubahan-perubahan tersebut membagikan wilayah administratif Aceh Tengah ke dalam tiga



kewedanaan, yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas.

- 3) Pada masa kemerdekaan, dinamika kehidupan masyarakat semakin berkembang dan hubungan antar wilayah menjadi semakin meningkat. Hubungan antar wilayah atau antar kewedanaan ditempuh melalui lintas Sumatera Utara. Prasarana dan sarana transportasi yang ada masih sangat sulit. Kesulitan-kesulitan ini akhirnya memekarkan Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua bagian pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Pemekaran tersebut menetapkan Kewedanaan Gayo Lues dan Tanah Alas sebagai wilayah pemerintahan baru, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Kewedanaan Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) pada masa itu melingkupi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Bukit, Bebesen, Timang Gajah, Silih Nara, Linge, dan Bandar, ditambah dengan dua perwakilan Kecamatan, yakni Pegasing dan Bintang. Luasnya wilayah kecamatan yang ada dan jarak rentang kendali beberapa kecamatan, telah menuntun pemekaran Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bandar masing-masing Kecamatan Syiah Utama dengan ibukotanya Rusip dan Kecamatan Ketol dengan ibukotanya Rejewali (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000).
- 4) Selanjutnya, pada tahun 2004 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali sehingga menambah sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan ibukotanya Redelong yang terbagi dalam tujuh kecamatan.
- 5) Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki potensi cukup besar di sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan pariwisata. Potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat memperluas kesempatan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi



daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan mengacu kepada kebutuhan daerah dan masyarakat pada masa kini dan yang akan datang.

- 6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan. Dokumen RPJP ini bersifat makro untuk jangka waktu 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. RPJP ini juga menjadi dasar dan landasan utama di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2012.
- 7) RPJP ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan segala unsur pelaku pembangunan. Diawali dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RPJP yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah ini. Selanjutnya, diikuti oleh pengumpulan data primer dan sekunder. Sebelum dokumen RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disahkan terlebih dahulu dibahas secara intensif di dalam forum Musrenbang yang juga melibatkan seluruh *stakeholders*, terutama unsur-unsur eksekutif, legislatif, dan semua elemen masyarakat di daerah ini.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjadi arahan dan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah; dan
- 2) Menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, DPRK, dan masyarakat dalam menentukan arah



pembangunan yang berwawasan jangka panjang sesuai dengan potensi dan kondisi, serta permasalahan dan prediksi untuk masa dua puluh tahun ke depan.

I.3. LANDASAN HUKUM

RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disusun berlandaskan pada perundang-undangan dan ketentuan/peraturan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 (drt) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



I.4. HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disusun dengan memperhatikan arah pembangunan jangka panjang Provinsi NAD yang dimaktub di dalam RPJP Provinsi NAD Tahun 2005-2025, dan RPJP Nasional. Oleh karena itu, RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini merupakan bagian dari sistem perencanaan Provinsi NAD dan Nasional. Substansi yang dimuat di dalam RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini juga mencermati rencana tata ruang Kabupaten Aceh Tengah agar terwujudnya pembangunan wilayah yang terpadu dan serasi.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan Hukum; Hubungan RPJP dengan Dokumen Lainnya; dan Sistematika Penulisan.

BAB II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Bab II ini memuat dua sub bab, yaitu : *Pertama*, Kondisi dan Analisis yang memuat tentang Geografis; Demografis; Ekonomi dan Sumber Daya Alam; Sosial Budaya; Prasarana dan Sarana; Pemerintahan; dan Agama serta Syariat Islam.



Kedua, Prediksi Kondisi Umum Daerah yang memuat perkiraan masa depan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif dari semua potensi yang ada.

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang diuraikan secara lengkap di dalam narasi matriks untuk masa dua puluh tahun ke depan.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini menguraikan beberapa hal penting sebagai penutup dan saran-saran untuk kesempurnaan RPJP ini.



BAB II

KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI

KONDISI UMUM DAERAH

II.1. KONDISI DAN ANALISIS

II.1.1. Geografis

- (1) Kabupaten Aceh Tengah terletak antara $04^{\circ} 10' 33''$ sampai $05^{\circ} 57' 50''$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 15' 40''$ sampai $97^{\circ} 20' 25''$ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $4.318,39 \text{ km}^2$ dengan ketinggian antara 200 meter sampai dengan 2.600 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah;
 - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues;
 - Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur; dan
 - Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.
- (2) Batas-batas Kabupaten Aceh Tengah dengan daerah tetangga yang ditandai dengan Pilar Batas Utama (PBU) masih terus dilakukan dengan harapan pada tahun 2012 Pilar Batas Antara (PBA) antar PBU disepanjang perbatasan Aceh Tengah sudah dapat dituntaskan.
- (3) Kabupaten ini memiliki iklim tropis. Musim kemarau biasanya jatuh pada bulan Januari sampai dengan Juli, sedangkan musim hujan terjadi setiap tahunnya pada bulan Agustus hingga Desember. Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.082 mm sampai dengan 2.409 mm dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Suhu udara sejuk yaitu berkisar $20,10^{\circ}\text{C}$, dan terdingin pada $19,70^{\circ}\text{C}$ (biasanya bulan September). Bulan terpanas adalah April dan Mei dengan suhu mencapai $26,6^{\circ}\text{C}$. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban nisbi 80%.



- (4) Topografi Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya bergunung dan berbukit. Kabupaten ini mempunyai sebuah danau yang diberi nama Danau Laut Tawar. Seluruh badan danau ini dikelilingi bukit yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi, dengan luas danau sekitar 5.472 ha. Airnya jernih dan bersih yang bersumber dari sejumlah mata air dengan 21 sungai kecil. Panorama Danau Laut Tawar yang indah ini menjadi salah satu objek wisata yang menarik bagi masyarakat dan para wisatawan (mancanegara dan domestik).

II.1.2. Demografis

- (1) Penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005 berjumlah 160.402 jiwa, sedangkan pada tahun 2006 jumlah penduduk meningkat sebesar 3,87% atau menjadi 170.766 jiwa, terdiri atas 84.379 jiwa laki-laki dan 86.387 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2006 adalah 40 jiwa/km². Kecamatan Bebesen adalah yang terpadat penduduknya, yaitu mencapai 716 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bies sebanyak 229 jiwa/km², Kebayakan 226 jiwa/km², Silih Nara 214 jiwa/km², dan Kute Panang 187 jiwa/km². Sementara yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Linge, yaitu hanya 4 jiwa/km². Pada tahun 2007 penduduk Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 182.126 jiwa, dan pada tahun 2008 penduduk Kabupaten Aceh Tengah meningkat 5,53% menjadi 192.201 jiwa.
- (2) Komposisi penduduk menurut usia pada tahun 2006 didominasi oleh kelompok usia 15-34 tahun. Kelompok usia ini mencapai 67.402 jiwa, atau sebesar 39,47% dari total penduduk. Selanjutnya diikuti oleh kelompok usia 0-14 tahun yang berjumlah 58.494 jiwa atau sebesar 34,25% sedangkan untuk kelompok usia 35-65+ tahun berjumlah 44.870 jiwa atau 26,27% dari jumlah penduduk kabupaten ini.
- (3) Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah 4.318,39 Km² (431.839 ha) dengan rincian penggunaan lahan eksisting pada tahun 2007



sebagai berikut: permukiman 4.106 ha, lahan kering dan basah 12.647 ha, perkebunan 20.045 ha, hutan lindung 142.490 ha, hutan produksi terbatas 52.776 ha, hutan konversi/taman buru 86.704 ha, dan lain-lain 113.071 ha.

II.1.3. EKONOMI DAN SUMBERDAYA ALAM

II.1.3.1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- 1) Perkembangan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) dari tahun 2005 sampai dengan 2007 mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 sebesar Rp.855.042.010.000,- tahun 2006 sebesar Rp.920.627.860.000,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp.972.803.000.000,.
- 2) Struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini masih didominasi sektor primer, pada tahun 2004 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 51,87% terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000), tahun 2005 kontribusi sektor primer naik menjadi 52,71% dan pada tahun 2006 kontribusi sektor primer turun menjadi 52,54% dari jumlah PDRB sebesar Rp.920.627.860.000,-. Pada tahun 2007 kontribusi sektor primer kembali turun menjadi 52,41% terhadap PDRB ADHK sebesar Rp.972.803.000.000,-. Kendatipun terjadi penurunan dan kenaikan, kontribusi sektor primer pasca pemekaran terbentuknya Kabupaten Bener Meriah tidak juga merubah struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah yang tetap didominasi sektor primer.
- 3) Sektor sekunder menempati urutan ketiga dengan kontribusinya pada tahun 2004 mencapai angka 14,99%. Kemudian pada tahun 2005 turun menjadi 14,36%, pada tahun 2006 turun sedikit menjadi 14,33%, dan kembali turun pada tahun 2007 menjadi 14,16% dari total PDRB ADHK.
- 4) Sektor tersier menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 32,69% pada tahun 2003. Pada tahun 2004 peranan sektor tersier



meningkat menjadi 33,15%, dan pada tahun 2005 menurun menjadi 32,93%. Pada tahun 2006 naik menjadi 33,12%, hingga akhir tahun 2007 kembali mengalami kenaikan sebesar 33,42% terhadap PDRB ADHK.

- 5) Berdasarkan kontribusi sektoral terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor primer didominasi oleh subsektor perkebunan, tanaman bahan makanan, dan kehutanan. Meskipun peranan sektor ini kian lama semakin menurun, namun hingga akhir tahun 2007 masih berada di urutan teratas. Untuk sektor tersier utamanya didukung oleh sektor jasa sebesar 13,64%. Pada sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 11,20% tahun 2007 didominasi oleh sub sektor bangunan.

II.1.3.2. Pendapatan Regional Perkapita

- (1) Berdasarkan harga konstan, pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003 sebesar Rp.4.562.339,- tahun 2004 meningkat menjadi Rp.4.671.633,- tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp.5.012.385,- tahun 2006 sebesar Rp.5.174.197,- dan pada tahun 2007 pendapatan regional per kapita Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp.5.211.576,-.
- (2) Berdasarkan harga berlaku, pendapatan regional perkapita Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003 sebesar Rp.6.113.946,- tahun 2004 meningkat menjadi Rp.6.807.707,- tahun 2005 meningkat lagi menjadi Rp.7.714.742,- tahun 2006 sebesar Rp.8.347.595,- dan pada tahun 2007 pendapatan regional per kapita Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp.9.130.407,-.

II.1.3.3. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

- 1) Sebagai daerah agraris, Kabupaten Aceh Tengah mempunyai potensi yang sangat besar di sektor pertanian. Sektor ini dengan andalannya pertanian (tanaman bahan makanan), perkebunan, kehutanan, dan tanaman bahan makanan merupakan salah satu prioritas dalam



percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi mengingat sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian di sektor ini. Orientasi pengembangan sektor pertanian secara bertahap diupayakan dan diarahkan untuk menopang sektor industri, perdagangan, dan lainnya melalui peningkatan intensifikasi, produktivitas dan mutu, serta jalinan kemitraan terutama dalam menunjang aspek permodalan dan pemasaran. Kendati demikian masih terdapat lahan-lahan pertanian yang belum digarap, dan bahkan ditelantarkan.

- 2) Tanaman Padi sangat prospektif untuk dikembangkan, baik Padi sawah maupun Padi ladang. Selama ini jenis Padi yang banyak dikembangkan oleh petani adalah Padi lokal. Upaya ekstensifikasi tanaman padi dengan mencetak sawah baru masih sangat dimungkinkan, terutama di daerah Pameu Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Celala. Luas areal panen Padi sawah di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 adalah 9.575 ha, dengan produksi 31.520 ton dan produktivitas per tahun per hektar 3,3 ton. Produksi dan produktivitas Padi ini masih dapat ditingkatkan melalui pengelolaan secara intensif dengan mengembangkan varietas bibit unggul disertai dengan pembangunan dan perbaikan irigasi.
- 3) Di Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat tanaman Jagung yang juga diusahakan oleh petani. Tanaman ini selain dibudidayakan di lahan kering juga diusahakan di lahan sawah setelah panen Padi. Produksi Jagung pada tahun 2006 sebanyak 1.626 ton, dengan luas area tanam 395 ha. Produktivitas tanaman ini per hektar adalah sebesar 4,1 ton per tahun. Lahan terluas terdapat di Kecamatan Silih Nara (125 ha) dan yang terkecil di Kecamatan Lut Tawar (11 ha). Pada umumnya Jagung dijual dalam bentuk biji dan panen muda. Hingga saat ini belum tersedia industri pengolahan sehingga nilai tambah yang diperoleh masih terbatas. Karena itu, untuk masa yang akan



datang dibutuhkan industri pengolahan Jagung agar nilai tambah dari komoditi tanaman Jagung lebih meningkat.

- 4) Kacang Tanah juga merupakan tanaman andalan para petani di Aceh Tengah. Sistem dan pola tanam pada umumnya sama dengan tanaman Jagung. Pada tahun 2006, produksi Kacang Tanah di daerah ini berjumlah 434 ton dengan luas areal tanam seluas 167 ha dan luas areal panen 164 ha. Produktivitas rata-rata sebesar 2,6 ton/ha. Lahan terluas di Kecamatan Ketol, yaitu mencapai luas 40 ha. Luas lahan terkecil di Kecamatan Bintang (hanya 5 ha). Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya benih yang bermutu (unggul). Akibatnya produksi yang dihasilkan masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun demikian, pengembangan tanaman ini pada masa yang akan datang sangat dimungkinkan karena lahannya masih cukup tersedia.
- 5) Kedelai merupakan komoditi yang juga dihasilkan oleh para petani di Aceh Tengah. Tahun 2006, luas panen secara keseluruhan berjumlah 274 ha dengan jumlah produksi sebesar 333 ton, produktivitas rata-rata masih 1,2 ton/ha. Sebagaimana halnya dengan Kacang Tanah, pengembangan tanaman Kedelai juga terhambat oleh kurangnya benih bermutu (unggul) yang tersedia, sehingga mengakibatkan produksi yang dihasilkan dari segi kualitas dan kuantitas masih rendah.
- 6) Ubi Jalar merupakan tanaman yang sangat mudah tumbuh dan berkembang. Luas panen tanaman ini di Aceh Tengah adalah 105 ha dengan produksi sebesar 2.047 ton. Produktivitas rata-ratanya 19,5 ton/ha. Hasil produksi Ubi Jalar biasanya dipasarkan dalam bentuk umbi. Belum ada industri pengolahan untuk ubi jalar hingga saat ini. Di mata masyarakat daerah ini, tanaman ini berfungsi sebagai *Peger Ni Keben*, atau sebagai *Buffer* (penyangga kehidupan), atau tanaman substitusi beras.



- 7) Ubi Kayu merupakan salah satu tanaman yang relatif mudah dikembangkan. Karenanya di setiap kecamatan dijumpai komoditi ini, walaupun ditanam dalam luasan areal yang kecil (terbatas). Tercatat luas panen seluruhnya 139 ha, dengan produksinya mencapai 2.519 ton dengan produktivitas 18,1 per hektar per tahun. Tanaman ini mempunyai pohon produk (*produk line*) yang banyak di antaranya dapat diproses menjadi tepung. Di Kecamatan Linge, telah ada pengolahan Ubi Kayu menjadi makanan ringan seperti tape dan kerupuk ubi. Sama seperti Ubi Jalar, komoditi ini juga berfungsi sebagai *Peger Ni Keben*.
- 8) Kentang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Aceh Tengah. Dari segi produksinya nyaris tidak mengalami kendala. Pada umumnya komoditi ini dijual dalam bentuk buah segar. Pada tahun 2006, terdapat 136 ha luas lahan Kentang, dengan luas panen 134 ha, produksi berjumlah 2.399 ton dan produktivitas rata-rata 17,9 ton/ha. Kawasan sentra produksi Kentang terdapat di Kung, Jejem, Arul Badak dan Wih Ilang di Kecamatan Pegasing, Atu Lintang, Jagong Jeget, dan Arul Item di Kecamatan Linge, dan di Daling, Atu Gajah, Belang Gele dan Pantan Terong di Kecamatan Bebesen. Kawasan-kawasan ini sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra produksi kentang pada masa depan. Persoalan yang dihadapi petani saat ini adalah terbatasnya bibit Kentang yang bermutu. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berupaya untuk mengembangkan varietas bibit Kentang berkualitas yang dikembangkan melalui Balai Benih Induk Merah Muyang Kecamatan Atu Lintang.
- 9) Cabe juga banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Aceh Tengah. Luas areal tanam Cabe 435 ha dan luas panen 311 ha, dengan produksi pada tahun 2006 sebanyak 1.896 ton, dengan produktivitas rata-rata berjumlah 6,1 ton/ha. Lahan terluas terdapat di Kecamatan Silih Nara (118 ha) dan luas lahan terkecil di Kecamatan



Lut Tawar (hanya seluas 13 ha). Budidaya tanaman ini selain di lahan kering, juga di lahan basah, terutama setelah musim panen Padi. Sistem dan pola tanaman ini ke depan harus diintensifkan agar produksi dan kualitas Cabe dapat ditingkatkan. Selain itu, diperlukan upaya menstabilkan harga agar gairah petani mengembangkan tanaman ini dapat terus dipacu. Saat ini sebagian petani telah memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti mengolah lahan dengan mulsa plastik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penyiangan, menjaga kelembaban tanah, dan mengaktifkan bakteri pengurai. Masyarakat pada saat ini mempunyai minat yang sangat tinggi untuk membudidayakan tanaman Cabe secara tumpang sari.

- 10) Bawang Merah dibudidayakan pada luas areal 123 ha, dengan produksi sebesar 992 ton pada luas panen 121 ha, dengan produktivitas rata-rata 8,2 ton/ha. Kecamatan Bintang memiliki lahan Bawang Merah terluas (40 ha), dan yang tersempit lahannya di Kecamatan Celala (1 ha). Selama ini, pemerintah daerah berupaya mendukung pengembangan komoditi ini, baik melalui pembinaan dan penyuluhan yang dialokasikan dananya dalam APBK Aceh Tengah.
- 11) Tomat juga salah satu tanaman yang diusahakan oleh masyarakat di daerah ini. Berdasarkan pengamatan, budidaya tanaman Tomat membutuhkan pekerjaan ekstra karena rentan terhadap penyakit dan iklim. Kendala yang dihadapi oleh petani dalam pengembangan budidaya ini, antara lain : *Pertama*, pola tanam yang dilakukan petani kurang mampu mencermati prospek pasar. *Kedua*, tanaman ini merupakan tanaman yang tidak tahan lama. *Ketiga*, tanaman ini rentan terhadap penyakit dan iklim. Sering dialami oleh petani bahwa produksi yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan, akibatnya komoditi tersebut menjadi busuk. Luas lahan tanaman Tomat pada tahun 2006 adalah 186 ha, luas panen Tomat 164 ha dengan produksi sekitar 1.966 ton, serta produktivitas rata-rata 12 ton/ha.



- 12) Kubis juga banyak dibudidayakan oleh petani di kabupaten ini. Luas tanaman Kubis sebesar 166 ha, luas panen 156 ha dengan produksinya 3.552 ton, serta produktivitas rata-rata 22,8 ton/ha. Seperti halnya Tomat, pola tanam dan waktu tanam Kubis sangat berpengaruh pada harga pasar. Tanaman ini juga tergolong sebagai tanaman yang tidak tahan lama dan cepat membusuk. Oleh karenanya, diperlukan teknologi dan teknis pengolahan untuk meningkatkan daya tahan produksi dan nilai tambahnya.
- 13) Wortel merupakan komoditi yang cocok dikembangkan di daerah ini. Tanaman ini sangat familiar dengan petani. Selama ini pemasaran Wortel yang dihasilkan daerah ini dilakukan melalui mata rantai perdagangan yang relatif panjang, sehingga harga beli ditingkat para petani kurang menguntungkan petani. Penentuan harga ditentukan oleh pedagang. Luas panen tanaman ini berjumlah 40 ha, dengan produksi 468 ton, serta produktivitas rata-rata 11,7 ton/ha. Sampai dengan tahun 2006, tanaman ini banyak diproduksi di Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Kute Panang.
- 14) Nenas merupakan tanaman yang telah lama berkembang. Namun, teknologi peningkatan nilai tambahnya relatif masih belum tersedia, dengan kadar airnya yang tinggi Nenas di daerah ini cocok untuk dikembangkan dan diolah menjadi bahan baku minuman kaleng, selai Nenas dan lainnya. Luas areal tanaman ini seluas 59 ha, namun luas panennya hanya 57 ha, dengan produksi 1.369 ton, dan produktivitas rata-rata berjumlah 24 ton/ha. Tanaman ini banyak dikembangkan di Kecamatan Pegasing dengan lahan seluas 44 ha. Selama ini komoditi Nenas dipasarkan keluar daerah dalam bentuk buah segar (belum diolah).
- 15) Kabupaten Aceh Tengah juga terkenal dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan. Misalnya Alpukat, dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk buah segar. Tanaman Alpukat yang ada merupakan jenis lokal dan biasanya dibudidayakan oleh petani sebagai tanaman



pelindung tanaman kopi. Pada saat ini, tanaman Alpukat telah mendapat sertifikasi sebagai komoditi unggulan daerah sekaligus menumbuhkembangkan varietas unggul. Tanaman Alpukat banyak ditanam sebagai batas perkebunan, dan dibudidayakan di suatu hamparan yang luas. Luas areal panen ini berjumlah 110 ha dengan produksi sebanyak 1.845 ton serta produktivitas rata-rata 16,8 ton/ha. Selain untuk makanan/minuman, Alpukat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik. Karena itu, komoditi ini memiliki prospek pasar yang luas pada masa yang akan datang.

- 16) Tanaman Marquisa juga tidak dibudidayakan pada hamparan yang luas. Umumnya tanaman ini dibudidayakan sebagai tanaman tumpang sari yang telah dikembangkan pada areal seluas 81 ha, luas panen 77 ha dengan produksi 637 ton, dan produktivitas rata-rata sebanyak 8,3 ton/ha. Lahan terluas terdapat di Kecamatan Pegasing (19 ha).
- 17) Jeruk Keprok Gayo merupakan komoditi unggulan daerah ini. Tanaman ini dibudidayakan dengan cara tanam sela atau pelindung tanaman lainnya dan tidak pada hamparan yang luas. Pada saat ini, tanaman Jeruk Keprok Gayo mengalami penurunan hasil akibat penyakit jamur akar. Sesuai kondisi dan lahan yang tersedia, komoditi ini masih memungkinkan dibudidayakan di seluruh kecamatan. Luas arealnya sebesar 379 ha, luas panen 249 ha dengan produksi 2.140 ton serta produktivitas rata-rata 8,6 ton/ha. Areal terluas terdapat di Kecamatan Pegasing yang mencapai 70 ha dan luas areal terkecil di Kecamatan Celala (hanya 12 ha).

II.1.3.4. Peternakan dan Perikanan

- 1) Penduduk Kabupaten Aceh Tengah juga mengembangkan budidaya ternak, seperti ternak besar dan kecil/unggas. Pada tahun 2006 populasi ternak besar adalah 23.189 ekor Kerbau, disusul Sapi 5.165 ekor, Kuda 1.773 ekor, Kambing 6.417 ekor, dan Domba 3.116 ekor. Ternak besar ini tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Untuk



ternak kecil yang paling banyak dipelihara masyarakat adalah Ayam Buras, yakni mencapai 133.819 ekor, Ayam Ras 198.143 ekor, Itik 63.208 ekor. Usaha peternakan ini masih dikembangkan secara tradisional, belum intensif dan komersial. Karenanya, produksi yang ada belum mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Pasokan daging masih harus didatangkan dari luar daerah. Produksi daging Sapi di Aceh Tengah sebanyak 10.743 kg, Kerbau 70.082 kg, Kambing 48.850 kg, Domba 14.882 kg, Ayam Buras 79.396 kg, Ayam Ras 145.805 kg dan Itik sebanyak 27.619 kg. Sejak tahun 2006 telah dikembangkan peternakan terpadu di Kecamatan Linge yang dikenal dengan Peternakan Ketapang I dengan sistem *mini ranche*, jumlah ternak yang telah disalurkan sebanyak 800 ekor Sapi untuk 100 peternak, atau rata-rata sebanyak 6 sampai dengan 8 ekor Sapi setiap peternak. Target kebutuhan Sapi yang direncanakan 15 ekor Sapi untuk setiap peternak.

- 2) Potensi perikanan yang dianggap menonjol di Aceh Tengah adalah perikanan darat, baik yang diusahakan melalui kolam dan sawah maupun perairan umum. Jenis ikan yang lazim dikembangkan melalui perikanan darat adalah Nila, Mujahir, Lele (*cat fish*) dan Ikan Mas. Budidaya perikanan mulai berkembang melalui pola jaring apung di Danau Laut Tawar. Namun produksinya masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal, Upaya pemenuhan kebutuhan ikan dengan mendatangkan dari luar daerah seperti Bireuen dan Lhokseumawe, baik ikan tebat (Bandeng dan Udang) maupun berbagai jenis ikan laut lainnya. Budidaya perikanan yang selama ini dikembangkan di daerah ini diusahakan oleh 901 orang pada budidaya kolam pada luas areal 41.353 m² dengan jumlah produksi 32 ton, 274 orang pada areal budidaya tancap 3.491 m² dengan jumlah produksi 9 ton dan 20 orang melalui jaring apung pada areal 751 m² dengan jumlah produksi 7,5 ton. Sedangkan potensi perikanan di Danau Laut Tawar pada tahun 2006 menghasilkan 31,2



ton dari berbagai jenis ikan. Sarana penangkapan ikan yang selama ini digunakan oleh para petani ikan berupa perahu tanpa motor sebanyak 517 unit dan motor tempel 138 unit. Permasalahan utama yang dihadapi dalam budidaya ikan adalah terbatasnya benih ikan yang dibutuhkan oleh petani.

- 3) Khusus untuk penanggulangan penyakit hewan, selama ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui dinas terkait melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit hewan guna melindungi populasi ternak, antara lain dengan melakukan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak setiap tahunnya. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk penanggulangan penyakit ternak/hewan guna melindungi populasi ternak/hewan di Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan memberikan vaksin bagi ternak/hewan yang terkena penyakit, selanjutnya dilakukan isolasi/karantina terhadap ternak/hewan yang terkena penyakit agar penyebaran penyakit dapat diminimalisir.

II.1.3.5. Perkebunan dan Kehutanan

- 1) Areal perkebunan yang tersedia di daerah ini cukup luas dan umumnya dikelola oleh rakyat. Komoditi kopi merupakan primadona dan menjadi tumpuan utama kehidupan mayoritas masyarakat tani di Aceh Tengah. Pertumbuhan dan struktur perekonomian daerah ini juga didominasi oleh sektor pertanian, bahkan persentase kontribusi perkebunan dalam PDRB mencapai 22,50% pada tahun 2006 (ADHK) dari 51,78% kontribusi sektor pertanian. Selain itu, sebagian besar PAD Kabupaten Aceh Tengah juga berasal dari redistribusi pasar komoditi kopi.
- 2) Luas panen perkebunan kopi mencapai 31.750 ha di Aceh Tengah. Produktivitas kopi rakyat relatif masih rendah, yaitu rata-rata 716,8 kg/ha/tahun (tahun 2006), seharusnya produktivitas Kopi Aceh Tengah bisa mencapai 1.200 sampai dengan 2.000 kg/ha/tahun. Hal



ini antara lain disebabkan belum intensifnya pembudidayaan tanaman Kopi oleh rakyat akibat berbagai kendala, seperti luasnya kebun terlantar akibat konflik.

- 3) Usaha peningkatan produksi dan produktivitas Kopi dapat ditempuh melalui usaha intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan. Sebab, jenis varietas dan usaha budidaya Kopi yang dikelola masyarakat di kabupaten ini tergolong yang terbaik di Tanah Air. Hal lain yang harus diupayakan adalah peningkatan proses pengolahan Kopi oleh masyarakat dengan cara-cara yang lebih baik, termasuk tempat penjemurannya yang higienis.
- 4) Berdasarkan potensi dan variasi ketinggian lahan dari permukaan laut, bermacam komoditi perkebunan dapat dikembangkan di daerah ini, utamanya adalah Tembakau, Nilam, Tebu, *Cassia vera* wangi, Lada, Jahe, Pala, Kelapa, Kakao, Aren, Kemiri, Pinang, Kapuk, dan lainnya. Namun, dari beberapa komoditi tersebut, Tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hingga tahun 2006 produksi Tebu Aceh Tengah sebanyak 14.464 ton, produktivitas Tebu 8 ton/ha/tahun dengan luas areal 5.424 ha dan luas panen 1.808 ha.
- 5) Kawasan hutan di kabupaten ini terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan suaka alam/taman buru. Hutan yang ada ini merupakan hutan alam tropis heterogen dan hutan pinus homogen. Potensi kehutanan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memelihara kelestarian ekosistemnya dengan mencegah berbagai aktifitas penjarahan dan pengrusakan hutan dan kawasan penyangganya.
- 6) Penataan hutan sebagai sumber daya alam dapat ditempuh melalui peningkatan penertiban hutan, reboisasi, dan rehabilitasi lahan kritis dan sumber alam lainnya. Langkah-langkah tersebut dipercayai akan dapat meningkatkan kelestarian hutan, di samping juga dapat mengembangkan hutan kemasyarakatan, serta memperluas aneka



usaha kehutanan, dan meningkatkan produksi kehutanan. Areal hutan yang tersedia relatif luas, yaitu mencapai 280.647 ha. Karena itu, sumbangan sub sektor ini di dalam PDRB Kabupaten Aceh Tengah (ADHK) tahun 2007 sebesar Rp.88.451.760.000 atau sebesar 9,09% dari sumbangan sektor pertanian.

- 7) Pengembangan subsektor kehutanan di daerah ini masih belum maksimal antara lain terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan dan pertanian lainnya, rendahnya komitmen *stakeholders* terhadap pelestarian hutan, penebangan kayu secara besar-besaran untuk kebutuhan konstruksi/rehabilitasi bangunan, kian luasnya lahan kritis, tidak jelasnya tapal batas hutan, dan minimnya *database* kehutanan yang tersedia.

II.1.3.6. Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

- 1) Usaha industri yang berkembang di Aceh Tengah tahun 2006 berjumlah 282 unit, dengan rincian sebagai berikut : 44 Kilang Kopi, 82 Kilang Tebu, 57 Tukang Jahit, 17 Tukang Emas, 21 Penjahit Kerawang, 18 Tukang Perabot, 10 Pengetaman Kayu, 19 Reparasi Sepeda Motor, 10 Penggilingan Bubuk Kopi, dan 4 Tukang Tahu. Pengembangan industri di masa depan, terutama untuk industri pengolahan, masih sangat memungkinkan, dengan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain peluang pasar untuk produk industri kecil sangat luas, bahan baku termasuk dari sektor pertanian sangat melimpah, pasar luar daerah semakin luas dengan terciptanya perdamaian dan mulai banyaknya para investor untuk menginvestasikan modalnya pada industri kecil dan menengah.
- 2) Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2007 seluruhnya berjumlah 2.830 unit. Aktivitas perdagangan yang berkembang di Kabupaten Aceh Tengah terbagi ke dalam 20 kelompok usaha dengan rincian sebagai berikut : 189 usaha warung,



46 usaha panglong, 393 usaha kelontong, 106 usaha jual pakaian jadi, 1.085 usaha rempah-rempah, 30 usaha penjual pupuk, 36 fotocopy, 12 toko buku, 337 penjual BBM, 287 usaha jual beli hasil bumi, 23 tukang emas, 62 usaha jual onderdil, 62 usaha bahan bangunan, 48 usaha perabot, 6 usaha barang bekas, 22 usaha reperasi jam/elektronik, 30 eksportir kopi, 3 usaha grosir, 18 pedagang pecah belah, 5 penyalur gas, 4 perusahaan yang aktif mengurus SPEK, 18 perusahaan daerah, dan 8 perusahaan yang belum mengurus SPEK.

- 3) Potensi pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data yang tersedia terlihat cukup menggembirakan. Berbagai jenis tambang seperti galian golongan C (tanah dan sirtu), logam emas, arsen, besi, seng, molibdent, timbal, granit, marmer, gamping, oker, bentonit, serpentin, batu sabah, dan lempung cukup tersedia di daerah ini. Akan tetapi, jenis tambang yang telah dikelola dan dimanfaatkan selama lima tahun terakhir hanya galian golongan C, lempung untuk batu bata, dan sumber air bawah tanah. Sedangkan jenis-jenis tambang lainnya sudah mulai dilakukan kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan terkait.

II.1.3.7. Koperasi, UMKM, dan Penanaman Modal

- 1) Koperasi merupakan wadah yang paling sesuai bagi masyarakat dalam memelihara kelestarian dan kelangsungan ekonomi rumah tangga dan merupakan tulang punggung bagi pengembangan usaha, baik usaha pertanian, industri, jasa-jasa, dan sebagainya. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 jumlah Koperasi hanya sebanyak 288 unit yang terdiri atas 16 jenis Koperasi. Jumlah yang tergolong sedikit tersebut terkait dengan kondisi daerah yang dilanda konflik dan dampak krisis ekonomi. Sementara itu upaya mengembangkan Koperasi masih sulit dilaksanakan, disebabkan oleh : (a) terbatasnya modal usaha Koperasi; (b) kualitas SDM pengelola Koperasi masih



rendah; (c) rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi; dan (d) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Menyadari akan hal ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama beberapa tahun terakhir telah membina dan mengembangkan sejumlah Koperasi dalam berbagai jenis, hingga akhirnya membuahkan hasil, dimana pada akhir tahun 2007 jumlah Koperasi bertambah menjadi 350 unit.

- 2) Disamping Koperasi di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat sejumlah usaha kecil dan menengah yang diusahakan dan dikelola oleh penduduk setempat. Tidak kurang dari empat jenis bidang UKM yang telah berkembang di daerah ini seperti di bidang perdagangan, industri, non industri, dan di bidang aneka jasa. Data yang tersedia, memperlihatkan bahwa pada tahun 2000 tercatat sebanyak 180 UKM, dan pada tahun 2005 hanya tinggal sejumlah 145 unit UKM dalam bidang sama, dan pada tahun 2006 terjadi pertambahan di bidang UKM ini menjadi 214 unit yang terdiri dari 119 usaha perdagangan, 30 industri, 25 non industri, dan 40 usaha aneka jasa.
- 3) Selama ini penanaman modal daerah lebih didominasi oleh sektor komoditi Kopi yang ditawarkan oleh instansi-instansi teknis di Aceh Tengah dalam kegiatan-kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Komoditi Kopi dapat menopang kehidupan kurang lebih 70% masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2005 di Kabupaten Aceh Tengah telah ada dua investor luar negeri yaitu PT. Indocafco (Perancis) dan NCBA (Perkumpulan Koperasi Amerika). Investor tersebut dalam melaksanakan bisnis-bisnisnya di Aceh Tengah bermitra dengan UKM dan Koperasi, sehingga dalam kegiatan bisnis sehari-hari dilaksanakan oleh mitra usahanya (hanya berperan sebagai donatur).



II.1.4. SOSIAL BUDAYA

II.1.4.1. Pendidikan

- 1) Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah ini, telah tersedia prasarana dan sarana pendidikan, baik pendidikan umum maupun agama yang berada di bawah Departemen Agama. Saat ini prasarana pendidikan umum di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 berjumlah 288 unit terdiri dari sekolah berstatus negeri berjumlah 288 unit terdiri dari sekolah berstatus negeri berjumlah 183 unit dan swasta berjumlah 105 unit. Untuk Sekolah Dasar Negeri terdapat 151 unit dan Sekolah Dasar Swasta terdapat 19 unit, 25 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri, dua unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta, delapan unit Sekolah Menengah Atas Negeri, dan lima unit Sekolah Menengah Atas Swasta, serta dua unit SMK Negeri.
- 2) Jumlah murid/pelajar/siswa di sekolah-sekolah pendidikan umum pada tahun 2006 seluruhnya sebanyak 39.281 orang yang terbagi ke dalam berbagai jenis pendidikan, yang diasuh oleh 2.404 orang guru. Rasio sekolah-pelajar untuk jenjang SLTP terlihat relatif memadai dengan 1 : 222. Artinya setiap SLTP menampung sebanyak 222 orang pelajar dan setiap kelas menampung sebanyak 35 orang pelajar. Begitu pula dengan sekolah menengah umum yang menampung sebanyak 382 siswa, atau satu ruang kelas menampung sebanyak 43 orang siswa. Ini menandakan bahwa jumlah sekolah menengah umum masih perlu ditambah untuk masa-masa mendatang.
- 3) Prasarana pendidikan agama pada tahun 2006 terdiri atas 24 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri 19 unit berstatus negeri dan 5 unit berstatus swasta. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 6 unit berstatus negeri dan 8 unit berstatus swasta. Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 9 unit, diantaranya 3 unit berstatus negeri dan 9 unit masih berstatus swasta.



- 4) Jumlah murid/pelajar/siswa pada sekolah pendidikan agama sebanyak 8.748 orang, dengan jumlah guru baik tetap maupun tidak tetap sebanyak 988 orang.
- 5) Selain jenjang formal, di Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat 148 Taman Pengajian Al Qur'an (TPA) dengan 10.420 santri dan satu Taman Kanak-Kanak Al Qur'an (TKA) dengan jumlah santri 100 orang.
- 6) Di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2006 juga terdapat 24 unit pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.319 orang, pada tahun 2007 jumlah pesantren di Kabupaten Aceh Tengah meningkat menjadi 35 unit.
- 7) Selain pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas, di Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat beberapa Perguruan Tinggi, antara lain Perguruan Tinggi Gajah Putih dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAT). Selebihnya perguruan tinggi kelas jauh. Kedua perguruan tinggi ini sudah memiliki prasarana dan sarana tersendiri walaupun belum cukup memadai. Pada tahun 2005 jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu pada kedua Perguruan Tinggi ini sebanyak 2.791 yang terdiri mahasiswa Perguruan Tinggi Gajah Putih sebanyak 2.591 orang dan mahasiswa STIHMAT sebanyak 200 orang. Jumlah dosen yang mengajar pada dua Perguruan Tinggi tersebut sejumlah 241 orang terdiri dari 202 orang dosen di Perguruan Tinggi Gajah Putih dan 39 orang dosen STIHMAT.

II.1.4.2. Kesehatan

- 1) Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2006 pelayanan kesehatan masyarakat selama ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan prasarana dan sarana yang tersedia, baik melalui dua Rumah Sakit yaitu RSUD Datu Beru Takengon dan Rumah Sakit Bersalin Yayasan Fandika. Selain kedua Rumah Sakit tersebut,



pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilayani oleh 13 Puskesmas, 23 unit Puskemas Keliling, 49 unit Puskesmas Pembantu, 218 unit Posyandu. Untuk melayani kesehatan kepada masyarakat telah tersedia 24 orang dokter umum, enam orang dokter spesialis, empat orang dokter gigi, 120 orang perawat, 91 orang bidan, 124 orang bidan desa, delapan orang tenaga kesehatan, 50 orang tenaga kesehatan masyarakat, enam orang tenaga kesehatan gizi, 14 orang tenaga analis kesehatan, dan 12 orang tenaga teknis medis. Pada tahun 2007, jumlah dokter spesialis bertambah satu orang menjadi tujuh orang dokter spesialis, hal ini terjadi dikarenakan oleh telah selesainya satu orang dokter spesialis dari tugas pendidikan spesialis. Sementara itu, pada tahun 2007 tenaga kesehatan gizi berkurang dua orang menjadi empat orang.

- 2) Berdasarkan rasio prasarana dan sarana yang tersedia per 10.000 penduduk, terutama untuk tenaga dokter spesialis, dan dokter gigi, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan gizi diketahui masih berada di bawah kondisi ideal. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap 10.000 penduduk masing-masing adalah 0,72. Artinya, setiap Puskesmas melayani sebanyak 13.135 orang penduduk, dan setiap Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3.485 orang penduduk. Rasio dokter umum terhadap 10.000 penduduk sebesar 1,4. Ini berarti seorang dokter umum melayani 7.115 orang penduduk. Jumlah dokter umum yang ada sekarang masih sekitar 5,22% dari jumlah tenaga kesehatan yang ada. Untuk ke depan, seiring dengan pertambahan penduduk, minimal harus tersedia dokter umum sekitar 15-20% dari jumlah tenaga kesehatannya. Begitu juga dokter spesialis, rasio terhadap 10.000 penduduk sangat rendah, yaitu 0,40. Maksudnya untuk 10.000 penduduk belum terdapat seorangpun dokter spesialis. Dalam arti yang lain, seorang dokter spesialis harus melayani 24.395 orang penduduk. Ketersediaan dokter spesialis masih 1,5% dari total tenaga kesehatan. Untuk ke depan, dokter



spesialis minimal harus 10% dari total tenaga kesehatannya. Rasio dokter gigi per 10.000 penduduk juga lebih buruk dari dokter spesialis, yaitu sebesar 0,23. Setiap dokter gigi harus melayani sebanyak 42.691 orang penduduk. Untuk itu, jumlah dokter gigi perlu juga ditingkatkan, demikian pula tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan gizi, serta tenaga medis. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini, masih ditemui berbagai permasalahan antara lain : (a) sarana yang tersedia belum memenuhi standar pelayanan; (b) prasarannya masih terbatas; (c) kualitas tenaga fungsional kesehatan masih belum memadai; dan (d) sistem informasi rumah sakit dan sistem administrasi manajemen kesehatan masih belum optimal. Seluruh permasalahan ini harus diupayakan penanganannya pada tahun-tahun mendatang guna melayani berbagai penyakit yang sering diderita penduduk di daerah ini seperti Ispa, *Gastroenteritis (GE)*, *Dyspepsia*, dan *Astma Bronchiolae*.

II.1.4.3. Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pada tahun 2007, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 90.493 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 64.957, jumlah tenaga kerja yang setengah menganggur sebanyak 19.174 jiwa dan jumlah pengangguran murni sebanyak 6.362 jiwa.
- 2) Persoalan yang dihadapi selama ini adalah belum berkembangnya jiwa atau semangat berwiraswasta (*entrepreneurship*) untuk memanfaatkan potensi yang ada, baik dalam lapangan usaha pertanian (perkebunan, tanaman pangan, dan lainnya), maupun yang non pertanian.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan dan memberdayakan potensi yang dimilikinya. Selama ini, pemerintah daerah melalui dinas/instansi teknis telah melakukan upaya pemberdayaan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pelatihan lembaga



pemberdayaan masyarakat, pengembangan kecamatan dan lembaga mukim (program Gema Assalam). Tujuannya antara lain adalah membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup, terutama yang kurang mampu memberdayakan peran lembaga kemukiman, dan mempercepat pengembangan wilayah kecamatan. Kendala yang dihadapi selama ini adalah terbatasnya anggaran (dana) dan sarana yang tersedia.

II.1.4.4. Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial

- 1) Keluarga sejahtera adalah salah satu program yang dilaksanakan dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui pengendalian tingkat kelahiran, dan pembinaan Pasangan Usia Subur (PUS). Untuk mensukseskan program ini, telah dibentuk 271 unit Pos KB Gampong, 550 unit sub POS KB Gampong (sub PPKBD) dengan 20 kelompok akseptor. Pada tahun 2006, tercatat 22.632 orang peserta aktif. Kendati demikian, implementasi program ini masih terkendala akibat : (a) tuntutan pelayanan program semakin meningkat, sementara tenaga pengelola pelaksana program KB dan KS baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan semakin berkurang, (b) adanya isu program KB tidak lagi menjadi agenda pembangunan nasional yang utama, dan (c) *stakeholders* dan berbagai media lainnya belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program ini.
- 2) Hingga akhir tahun 2007, di Kabupaten Aceh Tengah telah terdapat 21 unit panti asuhan/yayasan yang mampu menampung sebanyak 494 orang penyandang sosial (baik cacat tubuh, cacat mental, tuna netra, bisu, penyakit kronis, cacat sejak lahir, kurang gizi, serta 4.808 orang anak yatim dan 927 orang lansia. Upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan selama ini telah dilakukan melalui bantuan-bantuan, seperti alat bantu cacat, bantuan UEP, bantuan modal usaha pertanian, ternak, paket-paket sekolah, bantuan KUBE, dan bantuan sembako lainnya. Pembinaan para penyandang cacat ini juga telah



dilakukan melalui pelatihan keterampilan, seperti keterampilan menjahit dan keterampilan di bidang elektro. Kendala yang dihadapi dalam pembinaan para penyandang masalah sosial ini adalah masih kurangnya jumlah panti asuhan, tidak tersedianya balai latihan kerja yang khusus, serta kurangnya anggaran/biaya yang mampu disediakan pemerintah daerah. Di samping itu, masih banyaknya kelompok/anggota masyarakat miskin yang belum mampu diberdayakan kehidupannya.

- 3) Angka kemiskinan di Aceh Tengah sebanyak 16.966 rumah tangga (RT) pada tahun 2006.

II.1.4.5. Pemberdayaan Perempuan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, disertai perubahan dinamika kehidupan masyarakat dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat, telah menuntut perhatian yang lebih tinggi terhadap peranan perempuan. Peranan perempuan, terutama dalam pembinaan keluarga dan dalam proses pembangunan semakin diperlukan sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Peranan perempuan dalam pembangunan sekurang-kurangnya perlu diawali dengan pemberdayaan secara intensif, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya yang dimilikinya. Upaya-upaya ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh Tengah, terutama salah satunya melalui peningkatan kualitas karyawan-karyawan (aparatur) perempuan di semua dinas/instansi yang ada di daerah ini. Akan tetapi, upaya tersebut masih terkendala akibat minimnya anggaran/biaya yang mampu dialokasikan bagi pemberdayaan perempuan. Untuk ke depan, upaya pemberdayaan perempuan lebih ditingkatkan seiring dengan meningkatnya tuntutan kesetaraan gender, terutama peranan perempuan.



II.1.4.6. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Pembangunan kebudayaan yang dilakukan untuk menciptakan kemampuan masyarakat yang lebih tinggi di dalam berinovasi, berkarya, dan memelihara harga diri. Sedangkan adat istiadat, sebagai kebiasaan yang turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Nilai-nilai budaya dan adat-adat luar yang berkembang pesat sekarang ini harus dicermati, dievaluasi, dan diinventarisasi guna menjaga agar generasi yang akan datang tidak mengalami degradasi budaya. Untuk ke depan, nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Gayo harus terus dikembangkan, terutama budaya dan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat serta mendukung proses pembangunan daerah ke arah yang lebih maju.

II.1.4.7. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa akan mampu terwujud keabadiannya melalui pemupukan dan pembinaan wawasan kebangsaan. Masyarakat harus memahami, menyadari, dan menghayati pentingnya wawasan kebangsaan bagi melestarikan kehidupan yang damai dan berkesinambungan. Untuk ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai pelatihan yang menyangkut dengan upaya pelestarian wawasan kebangsaan ini. Hasil yang dicapai dalam pelatihan tersebut adalah meningkatnya wawasan kebangsaan bagi 56 tokoh masyarakat, pemuda dan wanita. Melalui peran dari para tokoh ini akan terbina rasa cinta tanah air dalam bingkai NKRI.

II.1.4.8. Pemerintahan

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada publik (masyarakat) yang cepat, baik, dan berkualitas sangat didambakan oleh seluruh penduduk di daerah ini. Meskipun hal itu telah diupayakan oleh pemerintah daerah beserta perangkatnya namun hasilnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat luas.



Kendati demikian, untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan bermutu tidaklah mudah karena masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan. Permasalahan yang mendasar antara lain adalah : (a) penyelenggaraan pemerintahan belum ditetapkan dalam suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) berbagai jenis kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat belum ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang jelas, (c) terbatasnya kemampuan dana untuk melaksanakan urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat, (d) batasan antara kewenangan yang menjadi urusan provinsi dan kabupaten belum cukup jelas; dan (e) dinas/badan/kantor atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) belum memiliki dokumen Rencana Strategis yang baku dan terarah sehingga tidak jelas sasaran yang akan dicapai untuk tahun anggaran.

- 2) Dalam bidang kepegawaian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan, antara lain : (a) penempatan pejabat struktural/PNS masih sering dipengaruhi nuansa politik dan belum sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki; (b) pengadaan/rekrutmen PNSD dilaksanakan belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan riil, baik menyangkut jumlah, maupun kualifikasi/kompetensi yang diperlukan; (c) reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan (d) prasarana dan sarana pendukung kegiatan aparatur kepegawaian belum memadai.
- 3) Peningkatan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah juga masih terkendala, terutama di bidang sekretariat. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini antara lain : (a) ruangan sidang utama yang belum representatif; (b) belum tersedianya ruang komisi dan ruang kelengkapan DPRK lainnya; (c) rendahnya kualitas sumberdaya aparatur; dan (d) terbatasnya referensi tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang tersedia.



- 4) Pengembangan kualitas pengawasan pembangunan belum optimal. Prasarana dan sarana yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kinerja di bidang inspektorat. Selain dari kendala ini, masih ada permasalahan lain yang belum teratasi, yaitu penempatan pegawai dan kualitas pegawai *auditor* belum sesuai dengan kebutuhan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan masih sangat minim, atau tergantung pada objek pemeriksaan.
- 5) Penataan dan penyimpanan dokumen dan arsip-arsip penting pemerintah daerah masih kurang baik. Selain itu, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai, arsip-arsip yang diterima tidak mengacu pada peraturan kearsipan yang berlaku, tidak adanya ruang depo arsip dan ruang referensi, dan masih kurangnya kesadaran anggota perpustakaan untuk mengembalikan bahan bacaan secara tepat waktu.
- 6) Kualitas dan kinerja aparatur, khususnya pada bagian penyusunan program, masih relatif terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya ketersediaan data yang akurat, kurangnya koordinasi antar instansi, terbatasnya kemampuan SDM, dan kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia.
- 7) Pengembangan perkampungan dalam wilayah Aceh Tengah selama ini telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan. Antara lain, menata kelembagaan permukiman, meningkatkan kualitas SDM perangkat gampong (desa), dan menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemekaran desa, peningkatan kemampuan penguasaan tugas-tugas, fungsi dan wewenang perangkat desa, tersedianya transportasi kepala desa, dan adanya alokasi dana untuk pemerintahan desa. Selain dari hasil yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya tapal batas wilayah kampung (desa), belum representatifnya kantor kepala desa yang ada, dan



belum adanya pendapatan asli desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung. Untuk pemerintah kecamatan, dari 14 kecamatan terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki kantor definitif, yaitu kantor Camat Jagong Jeget dan kantor Camat Bies, kantor Camat Atu Lintang dan kantor Camat Rusip Antara. Selama ini, keempat kecamatan tersebut melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahannya dengan menyewa rumah penduduk, menggunakan bekas gedung sekolah dan gedung PPL Perkebunan.

- 8) Saat ini di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 14 kecamatan, 16 kemukiman, 2 kelurahan, 266 kampung dan 794 dusun.
- 9) Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dan kendala yang masih dijumpai di bidang pemerintahan harus dilakukan langkah-langkah atau kebijakan dan program-program prioritas pada masa yang akan datang. Antara lain, penempatan personalia harus sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya, disertai dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pemerintahan dan penguatan lembaga DPRK, pembangunan gedung kearsipan, penyediaan data-data yang riil dan akurat di semua dinas/instansi, serta penataan/batas-batas perkampungan.

II.1.4.9. Hukum

- 1) Pengembangan dan penegakan hukum dimaksudkan untuk membimbing masyarakat ke arah yang benar, baik sikap/tingkah laku, perbuatan/tindakan maupun hubungan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap pelanggar hukum akan ditindak dan diberlakukan sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Untuk menangani tugas-tugas di bidang hukum tersedia sebanyak tujuh orang hakim, sembilan orang panitera, dan lima juru sita.



- 2) Kasus-kasus hukum yang terjadi selama tahun 2006, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana dapat digambarkan antara lain : perkara perdata yang masuk sebanyak 12 kasus, selesai diadili sembilan kasus, kasasi lima kasus, banding sembilan kasus, dan sisa akhir tahun 2006 sebanyak tiga kasus. Sedangkan perkara-perkara pidana yang masuk sebanyak 230 kasus, selesai diadili sebanyak 184 kasus, banding 11 kasus, dan kasasi sebanyak delapan kasus. Selain itu, masih terdapat 84 kasus sisa akhir tahun 2006 yang belum diselesaikan.
- 3) Pada tahun 2006, tercatat sebanyak 107 orang laki-laki dan 14 orang wanita sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman dikarenakan berbagai kasus pelanggaran.

Untuk ke depan, pemahaman hukum dan sanksi-sanksi hukum oleh masyarakat perlu ditingkatkan melalui bimbingan dan penyuluhan. Demikian pula bagi aparat penegak hukum diperlukan sikap adil tanpa memihak, dan menjadikan hukum tidak hanya sebagai ancaman, tapi juga pelajaran bagi siapa saja yang melanggarnya.

II.1.4.10. Agama

- 1) Pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi NAD dan seluruh wilayah kabupaten/kota merupakan suatu kemajuan paling pesat dalam bidang agama Islam. Meskipun agama Islam telah mengatur lengkap tuntunan syari'atnya, namun masih diperlukan adanya qanun-qanun yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam. Untuk terlaksananya syari'at Islam di Aceh Tengah, hingga tahun 2007 telah tersedia prasarana dasar berupa 207 masjid, 455 mushalla, 35 pesantren tradisional maupun modern. Dengan prasarana yang tersedia ini dinilai telah mencukupi bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 170.116 jiwa atau sebesar 99,62% dari jumlah penduduk, setiap satu masjid mampu menampung 822 orang



jamaah. Selanjutnya, setiap satu mushalla menampung sebanyak 373 orang jamaah. Rasio ini memperlihatkan bahwa jumlah prasarana ibadah yang tersedia sudah memadai.

- 2) Pengembangan syari'at Islam di kabupaten ini sejak berlakunya syari'at Islam di Provinsi NAD telah dilaksanakan melalui program-program, antara lain rekrutmen Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syari'at, sosialisasi qanun pelaksanaan syari'at Islam, pembekalan khatib, imam, dan guru pengajian, dan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan imam. Namun, masih ada sejumlah permasalahan yang belum tertanggulangi dengan baik, antara lain adalah : (a) terbatasnya dana yang mampu disediakan oleh pemerintah daerah; (b) belum semua komponen memahami pelaksanaan syari'at Islam secara baik dan benar; (c) masih kurangnya SDM pelaksanaan kegiatan syari'at Islam; dan (d) belum terpenuhinya fasilitas kegiatan operasional secara memadai.
- 3) Implementasi syari'at Islam di daerah ini masih dibarengi dengan tantangan atau ancaman yang sangat berat. Di satu sisi syari'at Islam harus terlaksana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi di sisi lain adanya pengaruh globalisasi dan budaya asing yang terus merambah ke daerah ini. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah kebijakan dan strategi apa yang harus ditempuh, sehingga pengaruh globalisasi dan budaya asing tidak mematikan nilai-nilai syari'at Islam yang berlaku. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperteguh dalam pelaksanaan syari'at Islam ke depan adalah tingginya motivasi masyarakat dan adanya instansi dan payung hukum untuk pelaksanaan syari'at Islam di daerah ini.



II.1.5. SARANA DAN PRASARANA

II.1.5.1. Perhubungan dan Pariwisata

- 1) Perhubungan, khususnya perhubungan darat berperan penting dalam memperlancar arus penumpang, barang dan jasa di suatu daerah, termasuk di Aceh Tengah. Untuk menghubungkan jalur antar wilayah, pedesaan, dan antar daerah di Kabupaten Aceh Tengah telah tersedia angkutan, baik untuk umum dan barang maupun kendaraan pribadi. Pada tahun 2006, tercatat sebanyak 21.508 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 1.403 mobil penumpang, 1.297 mobil barang, 186 bus, 18.580 sepeda motor, dan 42 becak bermotor.
- 2) Di dalam sektor perhubungan masih dihadapkan oleh beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :
 - a) Jumlah kendaraan roda tiga (becak) yang beroperasi belum teridentifikasi secara tepat, meskipun saat ini diperkirakan tidak kurang dari 800 unit;
 - b) Sebagian besar kendaraan angkutan penumpang/barang yang beroperasi di Aceh Tengah masih menggunakan plat luar daerah, sehingga secara langsung telah merugikan daerah, yaitu tidak adanya penerimaan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor);
 - c) Kurangnya personil LLAJ dan SDM teknis LLAJ.
- 3) Di daerah ini juga terdapat perhubungan danau, seperti kapal angkutan KM Lut Tawar, Dermaga Pante Menye, Dermaga Boom. Namun demikian, semua sarana perhubungan danau tersebut selama ini relatif kurang berfungsi disebabkan kurangnya dana perawatan kapal dan dana operasional, kurangnya dana perawatan Dermaga Pante Menye; dan minimnya dana rehab Dermaga Boom.
- 4) Sektor pariwisata pada dasarnya juga merupakan salah satu sektor primadona di daerah ini mengingat banyaknya objek dan daya tarik wisata, baik kekayaan alam, keragaman flora dan fauna, maupun ragam peninggalan sejarah dan sebagainya. Berkembangnya sektor ini akan berpengaruh ganda terhadap sektor lain. Selain dapat



mendorong berkembangnya nilai-nilai budaya daerah dan pelestarian lingkungan hidup, juga dapat memperluas kesempatan kerja. Objek-objek wisata di daerah ini tersebar di beberapa kecamatan, seperti Pante Meunye di Kecamatan Bintang, objek wisata Wih Porak di Silih Nara, Jalan Setapak Burni Gayo di Lut Tawar, objek Wisata Atu Belah di Linge, Singah Mata di Kecamatan Kebayakan serta objek-objek wisata lainnya.

- 5) Hingga Juli 2006 terdapat 103 tempat objek wisata yang terdiri dari 17 objek wisata pantai, 43 objek wisata teluk, 40 objek wisata budaya, dan tiga objek wisata buatan. Rata-rata jumlah kunjungan wisata per minggu adalah 5.849 kunjungan, yang terdiri dari 87 kunjungan dari para wisatawan mancanegara dan 5.762 kunjungan dari para wisatawan domestik.

II.1.5.2. Pos dan Telekomunikasi

Pos dan telekomunikasi juga salah satu unsur penting bagi pengembangan informasi dan komunikasi di daerah-daerah. Ketersediaan sarana pos dan telekomunikasi yang memadai, akan memperlancar arus informasi yang secara langsung turut mengembangkan aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sarana telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Aceh Tengah adalah telepon, wartel, warnet, dan kios *phone*, ditambah unit pelayanan Kantor Pos sebanyak 12 unit. Masih terdapat dua kecamatan lagi yang belum ada Kantor Pos. Selain itu, di kabupaten ini juga terdapat 25 unit perusahaan jasa pengiriman (titipan) milik swasta.

Di Aceh Tengah juga terdapat jaringan telepon sebanyak 3.554 kapasitas sambungan telepon, dan yang tersambung sebanyak 2.741 SST. Selain itu, hampir seluruh kecamatan telah dapat dijangkau telepon seluler yang dikelola oleh operator Telkomsel, Indosat dan Pro XL.



II.1.5.3. Listrik dan Air Minum

- 1) Peranan sektor ini sangat vital dalam setiap kehidupan masyarakat dan juga dunia usaha. Selain itu merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Produksi listrik dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non PLN. Sedangkan air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Walaupun sektor listrik dan Air minum merupakan sektor yang vital, namun kontribusi nilai tambah sektor ini dalam pembentukan PDRB (ADHK) di Aceh Tengah secara keseluruhan termasuk yang terkecil dibanding dengan sektor lain.
- 2) Energi listrik merupakan kebutuhan paling pokok bagi kehidupan rumah tangga masyarakat serta industri dan perkantoran. Untuk itu, PT. PLN Cabang Aceh Tengah telah berupaya meningkatkan jaringan listrik, dan menambah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk desa-desa terpencil. Upaya ini dilakukan agar terpenuhinya pelayanan listrik untuk seluruh warga masyarakat di daerah ini.
- 3) Distribusi jaringan listrik di Kabupaten Aceh Tengah dikelola oleh Ranting dan Sub Ranting. Untuk Kecamatan Ketol dan Kecamatan Kute Panang jaringan dikelola oleh kantor PLN Ranting Bandar Kabupaten Bener Meriah. Unit pembangkit listrik di Ranting Takengon sebanyak 12 unit, yaitu di unit pembangkit PLTD Dedalu dan unit pembangkit di Ayangan, dengan kapasitas terpasang sebesar 12,07 MW (mega watt). Dari 12 pembangkit tersebut yang dapat beroperasi normal hanya lima pembangkit, selebihnya dalam kondisi rusak dan kurang berfungsi, sehingga kemampuan daya yang dapat dihasilkan hanya 2,78 MW. Jika dibanding kebutuhan energi listrik dengan pembangkit yang tersedia, maka masih terjadi kekurangan energi. Karenanya, untuk mengatasi kekurangan tersebut, dilakukan interkoneksi dengan daerah lain (Sumatera Utara) terutama pada saat kebutuhan energi memuncak. Upaya meningkatkan pelayanan listrik



bagi seluruh warga Kabupaten Aceh Tengah masih dihadapkan pada keterbatasan pembiayaan. Kondisi ini tentu mempengaruhi proses percepatan daya jangkau dan pelayanan yang dapat disediakan. Dari 266 kampung dan dua kelurahan yang ada, 216 kampung (80,6%) yang telah mendapat penerangan listrik, sisanya sebanyak 52 (19,4%) kampung belum dialiri penerangan listrik (tahun 2006).

- 4) Pelayanan air minum di daerah ini masih belum mencakup seluruh rumah tangga. Di wilayah perkotaan sampai dengan akhir tahun 2006 hanya sebanyak 7.152 pelanggan dari jumlah tersebut pelanggan aktif berjumlah 6.155 pelanggan dan pelanggan non aktif berjumlah 997 pelanggan. Sejumlah 1.029 pelanggan mengalami kerusakan meteran dan 1.519 pelanggan belum memiliki *water meter*. Klasifikasi pelanggan PDAM Tirta Tawar adalah 102 pelanggan kategori golongan sosial, 59 pelanggan instansi pemerintah, 509 pelanggan niaga kecil dan 5.472 pelanggan rumah tangga.
- 5) Penyediaan air bersih di Takengon dilayani oleh PDAM Tirta Tawar melalui sistem penyediaan air bersih yaitu sistem jaringan Lelabu, Atu Gajah, Bebuli, Ulung Gajah, Burjenjani, Asir-Asir, Paya Reje, Paya Serngi dan Wih Kuli. Namun pelayanan tersebut belum mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Takengon karena sistem jaringan tersebut belum sempurna sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan air bersih di kawasan perkotaan.
- 6) Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang akan dilakukan adalah dengan memperbaharui sistem instalasi dan sistem pengolahan air baku menjadi air bersih sehingga kualitas air lebih higienis sekaligus dapat melayani kebutuhan air minum di Kota Takengon, termasuk untuk kota-kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk sebagian masyarakat diluar kota Takengon penyediaan air minum melalui penyediaan air bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan); Terdapat delapan IKK yaitu IKK silih Nara, IKK Pegasing, IKK Bintang, IKK Unit Toweren, IKK Ketol, IKK Jagong, IKK



Unit Kute Panang dan IKK Linge. Dari IKK yang ada hanya mampu melayani kebutuhan air minum masyarakat sebanyak 2.050 pelanggan.

II.1.5.4. Perhubungan (Jalan/Jembatan)

- 1) Kelancaran arus transportasi baik antar daerah, antar wilayah maupun, antar desa sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Hingga akhir tahun 2006, panjang jalan di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 1.437,70 km yang terdiri atas 172,19 km jalan negara, 361,49 km jalan propinsi, 648,16 km jalan kabupaten, dan jalan desa sepanjang 235,00 km serta jalan lingkungan 20,86 km. Kondisi jalan kabupaten hanya 187,76 km dalam kondisi baik, sementara 66,81 km dalam rusak ringan, 58,77 km dalam rusak sedang, rusak berat 18,43 km dan jalan yang belum diaspal terdiri dari jalan kerikil 122,32 km dan jalan tanah 194,07 km. Ke depan, kondisi jalan-jalan ini harus ditingkatkan, bahkan diperlukan penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pemasaran dari dan ke sentra-sentra produksi yang akan dikembangkan.
- 2) Hingga tahun 2007 tercatat sebanyak 54 unit (lokasi) jembatan di Aceh Tengah, dengan panjang seluruhnya 904 meter. Seluruh jembatan yang ada masih berada dalam kondisi baik.
- 3) Prasarana lainnya adalah irigasi yang selama ini mendukung pengelolaan dan pemanfaatan lahan sawah. Hingga tahun 2006, areal persawahan yang telah diairi irigasi adalah seluas 7.006 ha. Selebihnya, yaitu seluas 914 ha belum mempunyai saluran irigasi dan masih bersifat tadah hujan.



II.1.5.5. Perumahan dan Permukiman

Jumlah rumah tangga (RT) di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005 tercatat sejumlah 37.049 RT. Di antaranya sebanyak 28.635 RT mendiami rumah milik sendiri, 827 buah RT dengan status kontrak, 3.577 RT dengan status sewa, 1.359 RT yang bebas sewa, 563 buah RT mendiami rumah dinas, 1.996 RT mendiami rumah milik orang tua/keluarga, dan sisanya 92 RT mendiami tempat tinggal lainnya.

II.1.5.6. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu elemen penting pendukung terciptanya kesehatan, kenyamanan, dan ketenteraman hidup bagi penduduk. Selama ini pelbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terwujudnya Kota Takengon dan kawasan permukiman penduduk yang bersih lingkungan. Saluran-saluran pembuangan limbah dan tempat-tempat pembuangan sampah (TPA) telah ditangani dengan baik, di samping mencegah agar usaha-usaha ekonomi masyarakat tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (dampak lingkungan). Permasalahan yang masih dijumpai adalah kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

II.1.5.7. Kebersihan dan Pertamanan

Penataan Kota Takengon, termasuk pemeliharaan kebersihan dan pertamanan agar terciptanya keindahan dan kenyamanan kota telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kendatipun demikian, masih terdapat beberapa kendala. Yang paling dominan adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kebersihan, pertamanan, dan pemadam kebakaran. Selain itu, ketersediaan Ruang Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang tertata baik masih terbatas. Hal lainnya adalah belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang representatif, serta belum adanya sanitasi pengolahan limbah, dan rendahnya kesadaran masyarakat



di dalam membantu terwujudnya kebersihan dan keindahan kota dan wilayah seputar tempat tinggal mereka.

II.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

II.2.1. Perekonomian Daerah

- 1) Diperkirakan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Tengah meningkat setiap tahunnya hingga akhir masa RPJP 2025. Hal ini tercermin dari PDRB ADHK periode 2000-2004 hingga pemekaran, yang bertambah setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,30%. Pada tahun 2000 (sebelum pemekaran), PDRB wilayah ini senilai 701,98 milyar rupiah, lalu meningkat menjadi 780,64 milyar rupiah pada tahun 2004 (setelah pemekaran). Laju pertumbuhannya menurun dari 2,30% (sebelum pemekaran) menjadi 1,99% (setelah pemekaran). Diprediksikan nilai tambah PDRB ADHK daerah Aceh Tengah pada tahun 2010 akan meningkat menjadi 1,13 trilyun rupiah, dan tahun 2015 diperkirakan bertambah menjadi 1,41 trilyun rupiah, serta tahun 2025 diprediksikan menjadi 1,95 trilyun rupiah. Produktivitas sektor-sektor ekonomi masih dapat dipacu lebih tinggi dari yang diprediksikan, tergantung kinerja dari sektor-sektor tersebut dalam realitasnya di lapangan perekonomian.
- 2) Struktur ekonomi Kabupaten Aceh Tengah diperkirakan akan bergeser dari sektor primer (pertanian dan penggalian) ke sektor sekunder (industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan/konstruksi). Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan sektor primer. Pada tahun 2000 (sebelum pemekaran), kontribusi sektor primer sebesar 53,61%, sektor sekunder 14,29%, dan sektor tersier sebesar 32,10%. Di tahun 2004 kontribusi sektor primer menurun menjadi 51,88%, sektor sekunder menjadi 14,98%, dan sektor tersier menjadi 33,14%. Hasil proyeksi memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 kontribusi sektor primer



terhadap pembentukan PDRB ADHK turun menjadi 49,47%, tahun 2015 menurun menjadi 47,77%, seterusnya tahun 2020 menurun lagi menjadi 46,62%, dan tahun 2025 menurun menjadi 45,78%.

- 3) Kontribusi sektor sekunder pada tahun 2004, 2010, 2015 meningkat masing-masing menjadi 14,98%, 15,20%, dan 15,63%. Pada tahun 2020 kontribusi sektor ini meningkat lagi menjadi 15,93% dan diperkirakan tahun 2025 naik menjadi 16,14%.
- 4) Kontribusi sektor tersier terhadap pembentukan PDRB Aceh Tengah mengalami kenaikan yang relatif kecil selama 20 tahun ke depan, pada tahun 2000, kontribusi sektor ini masih rendah, yaitu 32,10%, lalu meningkat menjadi 35,33% pada tahun 2010, dan meningkat menjadi 36,59% pada tahun 2015. Pada tahun 2020 bertambah lagi menjadi 37,45%, dan diprediksikan tahun 2025 menjadi 38,07%. Peningkatan kontribusi sektor tersier ini bersamaan dengan menurunnya peranan sektor primer dalam lapangan perekonomian. Walaupun daerah ini adalah daerah pertanian/perkebunan, namun pada masa mendatang diharapkan pengembangan pertanian/perkebunan lebih didukung oleh industri pengolahan (agroindustri), sehingga peran sektor tersier (jasa) juga dapat berkembang dalam memasarkan hasil agroindustri tersebut ke luar daerah Gayo.
- 5) Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Aceh Tengah pada tahun 2000 masih sebesar 52,82%. Namun, kontribusinya mengalami penurunan pada tahun 2004 menjadi 51,05%. Diprediksikan kontribusi sektor ini terus menurun pada tahun 2010 menjadi 48,78%, dan tahun 2015 turun lagi menjadi 47,14%. Seterusnya, tahun 2020 juga menurun menjadi 46,02%, dan menjadi 45,21% pada tahun 2025. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini mencerminkan adanya pergeseran kontribusi ke sektor lainnya (biasanya semakin maju suatu daerah, kontribusi sektor pertanian



semakin menurun, sebaliknya kontribusi sektor sekunder dalam hal ini sektor agroindustri semakin bertambah).

- 6) Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, dalam hal ini subsektor penggalian sangat kecil dalam pembentukan PDRB Aceh Tengah. Tahun 2000, kontribusi subsektor ini sebesar 0,78%, meningkat menjadi 0,82% pada tahun 2004. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 2,65% per tahun, pada tahun 2010 sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,67%, dan menurun lagi menjadi 0,62% pada tahun 2015 dan 0,59% pada tahun 2020. Tahun 2025 diperkirakan kontribusinya turun menjadi 0,56%. Penurunan ini mengidentifikasikan kurangnya eksplorasi penggunaan sumber daya alam, untuk kedepan diharapkan eksplorasi sumber daya alam akan lebih ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 7) Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami pasang surut (berfluktuasi). Pada tahun 2000 kontribusinya sebesar 2,49%, lalu meningkat menjadi 2,63% pada tahun 2004. Jika diprediksikan pertumbuhan sektor ini sebesar 3,08%, maka kontribusi sektor ini menjadi 26,27 milyar rupiah pada tahun 2010, tahun 2015 naik lagi menjadi 30,46 rupiah, hingga tahun 2025 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 38,85 milyar rupiah terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan di wilayah ini ke depan akan lebih meningkat lagi secara signifikan sejalan dengan meningkatnya produk hasil bumi yang dapat diolah (agroindustri).
- 8) Sektor listrik dan air minum masih kecil kontribusinya dalam PDRB Aceh Tengah. Pada tahun 2004, kontribusi sektor listrik dan air minum di wilayah ini sebesar 4,1 milyar rupiah. Diprediksikan hingga pada akhir tahun 2025 pertumbuhan rata-rata sektor ini adalah sebesar 3,80%, dengan kontribusi 5,4 milyar tahun 2010, 6,6 milyar tahun 2015, 7,8 milyar tahun 2020, dan 9,03 milyar tahun 2025. Untuk ke depan diharapkan peranan sektor listrik dan air minum lebih besar lagi



dalam pembentukan PDRB mengingat sektor ini sangat penting peranannya dalam menunjang lapangan perekonomian daerah, terutama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri dan jasa.

- 9) Sektor bangunan dan konstruksi pada tahun 2000 kontribusinya sebesar 78,8 milyar rupiah terhadap PDRB, dan tahun 2004 bertambah 92,17 milyar rupiah. Diprediksikan dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar 5,22%, maka pada tahun 2010 kontribusi sektor ini bertambah menjadi 141,54 milyar, kemudian tahun 2015 bertambah lagi menjadi 183,38 milyar. Hingga tahun 2025, sektor ini mampu menyumbangkan sebesar 267,06 milyar terhadap PDRB. Diperkirakan sektor bangunan dan konstruksi akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya daerah Aceh Tengah untuk masa yang akan datang.
- 10) Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami pasang surut (berfluktuasi) dari tahun ke tahun. Di asumsikan pertumbuhan rata-rata sektor ini sebesar 5,88% setiap tahun, diharapkan pada tahun 2010 kontribusi sektor ini sebesar 151,80 milyar, lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi 201,18 milyar. Pada tahun 2020 menjadi 250,56 milyar, pada tahun 2025 menjadi 299,94 milyar. Ini berarti bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran harus dipelihara/dibina lebih kuat lagi peranannya dalam pembentukan PDRB Aceh Tengah pada masa mendatang. Oleh karena itu ke depan, diharapkan peranan sektor ini mampu menggerakkan perekonomian daerah sejalan dengan berhasilnya sektor industri pengolahan (untuk menggerakkan subsektor perdagangan) dan industri pariwisata (untuk menggerakkan subsektor hotel dan restoran).
- 11) Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2000 kontribusi sektor ini hanya 44,12 milyar, dan tahun 2004 bertambah sedikit menjadi 51,65 milyar rupiah. Diperkirakan sektor ini tumbuh rata-rata sebesar 2,8% setiap tahunnya, maka pada tahun 2010



kontribusinya diperkirakan meningkat sebesar 62,06 milyar, dan tahun 2015 menjadi 72,12 milyar. Diprediksikan pada tahun 2020 kontribusi sektor ini menurun menjadi 82,18 milyar rupiah, dan tahun 2025 menjadi 92,24 milyar rupiah.

- 12) Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, diperkirakan selama periode 2005-2025 tumbuh rata-rata setiap tahunnya sebesar 6,63%. Dengan asumsi tersebut, diperkirakan sumbangan sektor ini pada tahun 2010 sebesar 20 milyar rupiah, tahun 2020 meningkat menjadi 32,73 milyar dan hingga akhir tahun 2025 menjadi 39,10 milyar rupiah.
- 13) Kontribusi sektor jasa diperkirakan tumbuh rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,29% selama periode 2005-2025. Pada tahun 2000, kontribusi sektor ini sebesar 97,92 milyar, tahun 2005 sebesar 111,21 milyar rupiah. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 166,29 milyar, tahun 2020 meningkat lagi 261,70 milyar. Hingga tahun 2025 kontribusi sektor ini sebesar 309,41 milyar rupiah.
- 14) Sebelum pemekaran (tahun 2000), pendapatan regional per kapita Kabupaten Aceh Tengah ADHK berjumlah Rp.4.822.188,- kemudian menurun menjadi Rp.4.562.339,- pada tahun 2003. Penurunan ini diakibatkan oleh kondisi keamanan yang tidak kondusif pada periode ini. Namun, pada tahun 2004 seiring dengan meredanya konflik di Aceh secara menyeluruh, pendapatan regional per kapita Aceh Tengah meningkat menjadi Rp.4.671.633,-. Diperkirakan pendapatan regional per kapita Aceh Tengah akan meningkat menjadi Rp. 6.914.601,- pada tahun 2010, dan Rp. 8.917.153,- pada tahun 2015. Selanjutnya, meningkat lagi menjadi Rp. 10.919.705,- pada tahun 2020 dan bertambah menjadi Rp. 12.922.257,- pada tahun 2025.
- 15) Di masa mendatang penanaman modal, baik domestik maupun modal asing sangat diperlukan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang-peluang investasi masih terbuka, terutama di bidang



perkebunan, industri dan pertambangan. Tanaman perkebunan diprioritaskan pada komoditi ekspor dan yang mendukung pengembangan industri. Sementara pengembangan industri diprioritaskan pada industri yang dapat menimbulkan *forward* dan *backward linkage effects*. Peluang-peluang untuk mendatangkan investor ke daerah semakin terbuka terutama dengan disahkannya UUPA No. 11 Tahun 2006, di samping adanya ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah seperti : (a) Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Pelayanan Investasi Satu Atap; (b) Surat Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Pengajuan Permohonan PMDN/PMA; dan (c) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

II.2.2. Sosial Budaya

II.2.2.1. Pendidikan

- 1) Jumlah murid sekolah dasar (SD) tahun 2002 di Kabupaten Aceh Tengah 31.886 orang, sedangkan jumlah guru adalah 2.029 orang. Dengan demikian, rasio murid terhadap guru adalah 16. Artinya seorang guru berbanding dengan 16 orang murid, dan ini adalah rasio yang sangat ideal. Pada tahun 2004 jumlah murid berkurang menjadi 22.780 orang, sedangkan jumlah guru juga berkurang menjadi 1.113 orang. Dengan demikian, rasio murid terhadap guru turun menjadi 13. Penurunan jumlah murid dan guru pada masa ini disebabkan oleh keadaan daerah yang kurang kondusif. Data menunjukkan pada tahun 2002, jumlah gedung SD mencapai 269 unit, sedangkan pada tahun 2004 tersisa menjadi 156 unit. Pada tahun 2005, jumlah gedung SD bertambah menjadi 162 unit sejalan dengan kondusifnya kondisi daerah, namun jumlah murid dan guru menurun masing-masing menjadi 21.903 murid dan 1.303 orang guru. Penurunan jumlah guru dan murid ini kemungkinan disebabkan oleh belum ramainya migrasi kembali ke Aceh Tengah (sewaktu tidak kondusif banyak yang



mengungsi ke daerah lain), di samping memang jumlah murid SD semakin berkurang sejalan dengan rendahnya angka kelahiran (menurunnya jumlah balita). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan pada tahun 2010 jumlah murid SD menurun menjadi 19.039 orang, tahun 2015 menurun menjadi 16.395 orang, tahun 2020 menjadi 14.119 orang, dan tahun 2025 menurun lagi hingga mencapai 12.158 orang. Demikian pula halnya dengan guru. Bila dipertahankan rasio guru dan murid 1 berbanding 20, maka jumlah guru yang diperlukan pada tahun 2010 adalah sebanyak 981 orang saja, tahun 2015 sebanyak 820 orang, tahun 2020 sebanyak 706 orang, dan tahun 2025 hanya diperlukan 608 orang saja. Dengan kata lain, kelebihan guru pada saat ini dapat dipindahkan ke daerah lain yang mempunyai rasio guru berbanding murid lebih dari 1 : 20.

- 2) Jumlah murid sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun 2002 sebanyak 2.650 orang dan jumlah guru sebanyak 182 orang. Rasio murid dan guru adalah 15. Tahun 2004 terjadi peningkatan jumlah murid menjadi 3.685 orang dan jumlah guru juga meningkat menjadi 275 orang. Dengan demikian, rasio murid dan guru menjadi 13. Tahun 2005 jumlah murid MI bertambah lagi menjadi 3.680 orang dan jumlah guru bertambah menjadi 351 orang. Rasio murid dan guru menjadi 11. Penambahan murid di MIN ini sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam sehingga diperkirakan jumlah murid MIN semakin bertambah pada masa mendatang. Diprediksikan, pada tahun 2010 jumlah murid bertambah menjadi 4.152 orang, lalu tahun 2015 bertambah menjadi 4.586 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 5.065 orang, dan tahun 2025 bertambah menjadi 5.594 orang. Bila rasio murid dan guru dipertahankan pada rasio ideal sepanjang tahun, yaitu 1 : 20, maka diprediksikan pada tahun 2010 jumlah guru diidealkan menjadi 204 orang, kemudian tahun 2015 bertambah menjadi 229 orang, tahun 2020 menjadi 253 orang, dan tahun 2025 bertambah menjadi 280 orang.



- 3) Siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Aceh Tengah tahun 2002 berjumlah 9.623 orang, sementara jumlah guru sebanyak 733 orang. Dengan demikian, rasio guru dan siswa berbanding 1 : 13. Selain itu, tahun 2002 jumlah sekolah sebanyak 33 unit. Pada tahun 2004 terjadi penurunan jumlah sekolah menjadi 23 unit disebabkan oleh konflik. Ekseksnya jumlah siswa juga turun menjadi 7.142 orang dan guru juga berkurang menjadi 542 orang. Namun, rasio guru terhadap siswa tetap pada posisi angka 13. Tahun 2005 terjadi penambahan sedikit murid SMP menjadi 7.476 orang, sedangkan jumlah guru masih berkurang menjadi 513 orang. Dengan demikian, rasio guru dan siswa naik sedikit menjadi 14. Berdasarkan data riil tersebut, diperkirakan pada tahun 2010 jumlah siswa SMP bertambah menjadi 7.763 orang, selanjutnya tahun 2015 menjadi 8.322 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 8.922 orang, dan tahun 2025 diperkirakan bertambah menjadi 9.564 orang. Bila diasumsikan angka rasio guru-siswa ini konstan sepanjang tahun pada angka 20, maka diprediksikan akan terjadi penyesuaian jumlah guru di tahun 2010 menjadi 388 orang, tahun 2015 bertambah menjadi 416 orang, dan tahun 2020 jumlah guru bertambah menjadi 446 orang, serta tahun 2025 diperkirakan mencapai 478 orang.
- 4) Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) telah mengalami penurunan jumlahnya dari sebanyak 2.825 orang pada tahun 2002 menjadi 2.596 orang pada tahun 2005. Penurunan jumlah murid MTs ini juga dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di daerah ini dan NAD. Hal ini dibuktikan pada tahun 2005 jumlah siswa MTs kembali bertambah menjadi 2.679 orang, dan jumlah sekolah juga bertambah dari 13 unit (tahun 2004) menjadi 15 unit (tahun 2005). Sedangkan jumlah guru bertambah dari 186 orang pada tahun 2004 menjadi 326 orang pada tahun 2005. Sehingga rasio guru dan siswa turun drastis dari 1 : 14 (tahun 2004) menjadi 1 : 8 (tahun 2005). Penambahan guru yang cukup signifikan ini kemungkinan didasari pada pentingnya guru MTs



di masa mendatang sejalan dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Berdasarkan data riil tersebut, diprediksikan jumlah siswa MTs daerah ini tahun 2010 bertambah menjadi 3.136 orang, tahun 2015 menjadi 3.670 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 4.295 orang, dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 5.027 orang. Demikian pula jumlah guru, bila diasumsikan rasio guru dan siswa bertahan pada posisi 1 : 20 sepanjang tahun, maka pada tahun 2010 diperlukan jumlah guru sebanyak 157 orang, tahun 2015 sebanyak 183 orang, tahun 2020 sebanyak 215 orang, dan tahun 2025 diperlukan penambahan guru menjadi 251 orang. Dengan demikian selama 20 tahun ke depan, di Aceh Tengah tidak diperlukan penambahan guru MTs bila rasio guru dan siswa dipertahankan konstan pada rasio ideal 1 : 20. Dengan kata lain pada tahun 2005 terjadi kelebihan guru sebanyak 169 orang.

- 5) Pada tahun 2002, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 5.268 orang, selanjutnya menurun menjadi 4.757 orang pada tahun 2004. Tetapi, bertambah secara signifikan pada tahun 2005 menjadi 5.881 orang, sejalan dengan kondusifnya daerah dan pemberlakuan Syariat Islam. Di sisi lain, jumlah guru bertambah 318 orang (tahun 2002), menjadi 411 orang (tahun 2004), dan bertambah lagi menjadi 413 di tahun 2005. Sedangkan rasio guru dan siswa pada tahun 2002 berbanding 1 : 17, tetapi di tahun 2005 menurun menjadi 1 : 14. Berdasarkan data riil tersebut, diprediksikan jumlah siswa SMA daerah ini tahun 2010 bertambah menjadi 7.065 orang, tahun 2015 bertambah menjadi 8.488 orang, dan tahun 2020 bertambah menjadi 10.197 orang, serta tahun 2025 diperkirakan jumlah siswa SMA bertambah menjadi 12.250 orang. Sedangkan jumlah guru diprediksikan juga bertambah tahun 2010 menjadi 353 orang (sesuai dengan perbandingan ideal yakni 1 : 20), tahun 2015 menjadi 424 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 510 orang, dan tahun 2025 diperkirakan menjadi 613 orang.



- 6) Jumlah siswa Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2002 sebanyak 1.704 orang, lalu meningkat menjadi 1.943 orang di tahun 2004, dan meningkat lagi menjadi 1.955 di tahun 2005. Sementara jumlah guru MA pada tahun 2002 sebanyak 148 orang dan bertambah menjadi 178 orang di tahun 2004 serta bertambah cukup signifikan pada tahun 2005 menjadi 190 orang. Dengan demikian rasio guru dan siswa tahun 2002 yang berbanding 1 : 12 menurun menjadi 1: 11 pada tahun 2004, selanjutnya dan menurun lagi menjadi 1 : 10 pada tahun 2005. Berdasarkan angka tersebut, diperkirakan pada tahun 2010 jumlah siswa MA bertambah menjadi 2.458 orang, lalu tahun 2015 bertambah menjadi 3.091 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 3.886 orang, dan tahun 2025 diperkirakan sebanyak 4.886 orang. Sementara jumlah guru (bila diasumsikan rasio guru dan berbanding berbanding 1: 20 dan dianggap konstan) ditambah menjadi 123 orang pada tahun 2010, menjadi 155 orang tahun 2015, kemudian bertambah menjadi 194 orang pada tahun 2020. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah guru bertambah menjadi 233 orang.
- 7) Jumlah mahasiswa di Aceh Tengah tahun 2004 sebanyak 93 orang, yaitu di STJ Hukum Muhammadiyah. Pada tahun 2005 jumlah mahasiswa bertambah secara signifikan menjadi 2.791 orang di STJ Hukum Muhammadiyah dan Gajah Putih. Sementara dosen pada tahun 2004 berjumlah hanya 22 orang. Pada tahun 2005 terjadi penambahan dosen yang cukup signifikan menjadi 241 orang. Dengan demikian, rasio antara dosen dan mahasiswa pada tahun 2004 adalah 1 : 4, dan tahun 2005 menjadi 1 : 12. Berdasarkan data tersebut, diprediksikan pada tahun 2010 terjadi penambahan jumlah mahasiswa menjadi 3.730 orang, tahun 2015 bertambah menjadi 4.985 orang, tahun 2020 bertambah menjadi 6.662 orang, dan tahun 2025 diperkirakan berjumlah 8.903 orang. Penambahan yang cukup signifikan ini diperkirakan karena ada perguruan tinggi swasta yang



berubah status menjadi universitas negeri, di samping adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang mendorong lulusan SMA/MA dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Sementara jumlah dosen bila diinginkan rasio yang ideal 1 : 20, pada tahun 2010 harus disesuaikan menjadi 186 orang, tahun 2015 menjadi 249 orang, dan tahun 2020 menjadi 333 orang, serta tahun 2025 menjadi 445 orang. Ke depan, diharapkan perguruan tinggi atau universitas yang ada di Aceh Tengah dapat membantu percepatan pembangunan daerah dengan melibatkan para lulusannya untuk berkiprah di daerahnya sendiri.

II.2.2.2. Kesehatan

- 1) Bila ditelusuri lebih jauh, rasio dokter per 10.000 penduduk Aceh Tengah, pada tahun 2001 adalah sebesar 1 : 7.693. Artinya, seorang dokter melayani 7.693 orang penduduk. Sedangkan di tahun 2005 rasio dokter per 10.000 penduduk daerah ini menurun menjadi 1 : 6.689 orang. Rasio jumlah ideal sumber daya manusia baik medis maupun para medis yang harus tersedia adalah dokter umum 24 : 100.000 jiwa, dokter spesialis 6 : 100.000 jiwa, dokter gigi 11 : 100.000 jiwa, bidan 40 : 100.000 jiwa, apoteker 9 : 100.000 jiwa, perawat 158 : 100.000 jiwa, dan bidan desa 1 : 1 desa. Selain itu, jumlah pasien baik rawat inap maupun rawat jalan semakin banyak. Jenis penyakit yang paling dominan diderita pasien rawat jalan adalah malaria (mencapai 45,23% dari seluruh jenis penyakit yang ada). Selanjutnya, di urutan kedua terbesar adalah penyakit diare (mencapai 33,73% dari jumlah pasien seluruh penyakit). Di urutan ketiga terbesar adalah disentri yakni sebesar 13,49%. Pada tahun 2006, jumlah penderita malaria hanya tinggal 99 orang, namun penderita diare masih mendominasi para pasien di Kabupaten Aceh Tengah yakni sebanyak 453 orang. Selain kedua penyakit tersebut, perlu juga diwaspadai jenis-jenis penyakit lain, seperti misalnya



Pneumonia, TBC, dan Hepatitis. Oleh karena itu ke depan diperlukan penanganan medis terutama bagi ketiga jenis penyakit ini dengan menambah jumlah dokter dan petugas pelayanan kesehatan lainnya, di samping juga memperbaiki dan menyempurnakan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Polindes, Posyandu, dan sebagainya.

II.2.2.3. Tenaga Kerja

- 1) Lapangan kerja yang berpeluang diciptakan pada masa depan adalah di sektor pertanian (terutama subsektor perkebunan), pertambangan, dan industri. Khusus untuk pengembangan industri sektor-sektor potensial ini diperlukan investasi yang besar, terutama dari pihak swasta (domestik dan asing). Oleh karena itu, diawali dengan identifikasi potensi dan peluang-peluang investasi, serta melengkapi faktor-faktor komplementer lainnya seperti prasarana jalan, komunikasi, lembaga keuangan, serta kemudahan-kemudahan lainnya.

II.2.2.4. Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Sosial

- 1) Tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin 16.966 RT, tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin turun menjadi 16.791 RT. Diperkirakan ke depan, jumlah penduduk miskin di daerah ini akan berkurang sejalan dengan membaiknya perekonomian daerah dan nasional secara makro, di samping adanya kemauan yang kuat dari kaum miskin untuk melepaskan dirinya dari lilitan kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dikurangi lagi bila program penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibarengi kemauan dari si miskin itu sendiri.
- 2) Program keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial ke depan masih tetap harus diprioritaskan. Meningkatnya jumlah penduduk perlu



diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana sosial yang cukup. Adanya tuntutan pelayanan keluarga berencana, misalnya, diperlukan kesiapan di bidang administrasi dan manajemen, tenaga pengelola yang profesional dan berkualitas, serta kesadaran pihak laki-laki terhadap kesejahteraan keluarganya. Dengan ini, tantangan hidup ke depan, terutama dalam mengantisipasi pelbagai perubahan dan kesulitan ekonomi akan berpengaruh pada keluarga-keluarga yang kemampuan ekonominya relatif terbatas.

- 3) Pengembangan dan penyediaan prasarana atau tempat-tempat penampungan/pembinaan para penyandang masalah sosial di masa depan masih harus dilanjutkan. Jumlah panti asuhan yang ada masih terbatas, sementara pada tahun 2007 tercatat sebanyak 1.190 orang anak yatim dan 1.775 orang lansia yang belum memperoleh pembinaan dan pemberdayaan. Di sisi lain, jumlah penduduk penyandang masalah sosial ini diperkirakan belum berkurang, walaupun tidak diharapkan untuk bertambah.

II.2.2.5. Pemerintahan

Untuk masa depan, diperkirakan urusan pemerintahan makin bertambah berat dan makin meluas. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan penduduk, memerlukan pelayanan publik yang lebih luas. Pemenuhan fasilitas-fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya akan meningkat. Atas dasar ini, ke depan diperlukan pembenahan, penyempurnaan, dan pembinaan dalam bidang pemerintahan. Penggabungan dinas-dinas dalam satu dinas yang disesuaikan dengan PP Nomor 41 Tahun 2007, selain itu penempatan personalia perlu disesuaikan dengan disiplin ilmu dan kualitas kinerjanya. Peningkatan kualitas aparatur perlu ditingkatkan di semua dinas-dinas/instansi, sehingga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat di masa depan, di samping dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai tantangan dan permasalahan akan



dihadapi di masa depan akan bertambah, seiring dengan meningkatnya tuntutan pembangunan di berbagai bidang. Tantangan dan permasalahan-permasalahan tersebut semestinya harus sudah diantisipasi dan terjawab sejak dini.

II.2.2.6. Hukum

Kuatnya suatu pemerintahan adalah bila hukum juga kuat. Penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan yang telah disahkan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman, persaingan hidup di masa depan juga makin besar dan sulit. Adanya pertambahan penduduk, membuat persaingan memperebutkan kekuasaan dan kepentingan menjadi semakin tajam. Keadaan ini bukan tidak mungkin akan berhadapan dengan aturan-aturan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Untuk meminimalkan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis dalam pelayanan publik sangat diperlukan program yang tepat berupa Rencana Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) untuk mengantisipasi perlakuan-perlakuan negatif yang mungkin timbul di masa depan, maka peningkatan pemahaman hukum dengan segala akibatnya bagi masyarakat pada umumnya sangat dibutuhkan. Pendidikan hukum perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan menengah dan pesantren-pesantren terpadu, di samping sosialisasi hukum secara berkala. Selain itu, ke depan diperlukan perda (Qanun) yang mengatur tentang semua aktivitas kegiatan masyarakat dalam rangka memelihara keutuhan bangsa, kelestarian perdamaian, kerukunan hidup, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

II.2.2.7. Agama

Pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam di masa depan diperkirakan akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Perkembangan teknologi dan budaya yang semakin pesat dikhawatirkan akan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, baik dalam bersikap, bertingkah



laku, maupun dalam wawasan dan pola pikir. Pengaruh-pengaruh tersebut terutama sekali tertuju pada generasi muda (pemuda dan pemudi) yang senang dengan pembaharuan tanpa memikirkan dampak buruk sesuai pandangan agama. Para generasi muda tidak terikat dengan nilai-nilai agama sebagai akibat dari kepungan teknologi dan budaya yang sangat menyenangkan. Padahal, perlu disadari bahwa kenikmatan dan kesenangan dunia adalah bagai mimpi orang yang sedang tidur. Setelah mereka terjaga dari tidurnya, maka apa yang sesungguhnya dinikmati dalam mimpi adalah hanya mimpi belaka. Mereka akan merasakan apa yang sebenarnya harus mereka rasakan. Mengatasi hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu membangun pesantren-pesantren yang terpadu, balai-balai pengajian, dan majelis-majelis taklim, serta kumpulan-kumpulan remaja masjid, guna mengasuh dan membina akhlak dan aqidah masyarakat generasi muda sedini mungkin. Upaya ini merupakan alat penangkal bagi mereka dalam menghadapi degradasi akhlak di masa yang akan datang.

II.2.3. Prasarana dan Sarana

Di masa depan diperkirakan tuntutan pelayanan terhadap prasarana dan sarana akan semakin meningkat. Peningkatan kegiatan masyarakat di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, dan industri serta pengolahan di semua sektor ekonomi lainnya memerlukan dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Prasarana jalan yang memungkinkan pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi potensial mutlak diperlukan. Jaringan-jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier harus tersedia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, di samping untuk peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, prasarana dan sarana air bersih (air minum) dan kelistrikan juga merupakan kebutuhan paling utama di masa depan. Begitu juga prasarana ekonomi, seperti pusat-pusat perdagangan, pasar lelang, pasar tradisional di setiap Kecamatan, lembaga-lembaga perbankan yang dapat menjangkau seluruh kebutuhan permodalan penduduk sedianya direncanakan sejak sekarang. Tidak kalah



pentingnya prasarana-prasarana sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin (kurang mampu) perlu juga diprioritaskan di masa depan.



BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

III.1. VISI

Visi merupakan gambaran masa depan yang ideal yang didambakan untuk diwujudkan. Ideal yang dimaksud memiliki makna lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Visi juga merupakan cita-cita luhur dari suatu pemerintahan dan masyarakat untuk hidup makmur, aman, dan damai. Penetapan visi itu sendiri didahului oleh rumusan kondisi masa kini, perkembangan masa depan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun lainnya. Termasuk di dalam hal ini dinamika kehidupan masyarakatnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tengah adalah : “***Terwujudnya Masyarakat Aceh Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Islami***”.

Visi tersebut mengandung makna secara rinci sebagai berikut:

1. Maju

Dimaksudkan masyarakat Aceh Tengah yang mampu dan berkembang dalam semua segi kehidupan, baik di bidang agama, ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan, maupun bidang lainnya. Majunya masyarakat dalam semua bidang ini merupakan cerminan bagi maju dan berkembangnya Kabupaten Aceh Tengah sebagai suatu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara lebih khusus tentang kemajuan dan perkembangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Maju dalam bidang agama

Bermakna masyarakat Aceh Tengah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, mempunyai hubungan yang erat dengan Allah, hubungan yang erat dan harmonis dengan sesama manusia dan alam sekitar, dan masyarakat yang teladan dalam bidang agama dan dalam menjalankan syariat Islam.



b) Maju dalam bidang ekonomi

Dimaksudkan masyarakat Aceh Tengah yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan sempurna baik primer, sekunder maupun tersier, masyarakat yang produktif, inovatif, dan dinamis, mampu bersaing baik kuantitas maupun kualitas produksi dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi.

c) Maju dalam bidang pendidikan

Adalah masyarakat Aceh Tengah yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang andal, dalam arti mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memiliki etika, dan mampu bersaing dengan dunia luar di bidang pengetahuan dan keterampilan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

d) Maju dalam bidang sosial budaya

Dimaksudkan bahwa masyarakat Aceh Tengah adalah masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar sesama, saling hormat dan saling menghargai, serta masyarakat yang berbudaya yang mampu mempercepat proses pembangunan daerah. Selain itu, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mampu mengadopsi nilai-nilai budaya asing yang dapat mendukung pembangunan daerah dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

e) Maju dalam bidang politik dan pemerintahan

Artinya masyarakat Aceh Tengah yang memiliki pemahaman politik yang positif dan berkembang, dinamis, serta memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, taat pada pimpinan, sadar hukum, dan cinta akan perdamaian, serta memiliki pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa, dengan menempatkan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan yang lainnya.



2. Mandiri

Dimaksudkan bahwa masyarakat Aceh Tengah adalah masyarakat yang bebas dari ketergantungan, memiliki daya cipta, dan mampu menetapkan tujuan dan sasaran masa depan dengan mengedepankan kekuatan sendiri, tanpa mengenyampingkan hubungan kerjasama dan hubungan antar sesama.

3. Sejahtera

Masyarakat Aceh tengah yang bebas dari kemelaratn, kebodohan, kemiskinan, bebas dari ancaman, layak dalam kehidupan, sehat jasmani dan rohani, aman, tertib, damai, rukun dan tenteram dalam keluarga dan masyarakat, serta terlindung dari berbagai petaka dan bencana.

4. Islami

Dimaksudkan masyarakat Aceh Tengah adalah masyarakat yang memahami ajaran agama Islam (memiliki pengetahuan agama Islam yang luas), taat dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup berdasarkan ridha Allah.

III.2. MISI

Misi adalah suatu tugas agung yang diemban oleh seluruh aparatur pemerintah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat Aceh Tengah untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan misi pembangunan daerah Aceh Tengah dalam jangka panjang sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan terlaksananya syariat Islam yang kaffah;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (penguasaan iptek);
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam di semua sektor;



- 6) Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian dan perkebunan;
- 7) Meningkatkan kualitas infrastruktur;
- 8) Mengembangkan objek-objek wisata;
- 9) Mengembangkan industri-industri pengolahan;
- 10) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah;
- 11) Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial;
- 12) Meningkatkan kerjasama internasional; dan
- 13) Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memelihara perdamaian.

Seluruh misi tersebut di atas akan dapat terlaksana dengan baik, jika dipenuhi beberapa asumsi sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya syariat Islam yang kaffah;
- 2) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah;
- 3) Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan perdamaian yang abadi, serta stabilnya politik dalam negeri;
- 4) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia;
- 6) Meningkatnya kesadaran hukum seluruh masyarakat;
- 7) Terciptanya kerjasama yang sinergis antar instansi;
- 8) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- 9) Terjalannya kerjasama nasional dan internasional; dan
- 10) Adanya partisipasi dan dukungan masyarakat yang maksimal.

III.3. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tengah secara umum didasarkan kepada visi yang ingin dicapai melalui rangkaian misi yang akan dilakukan. Kebutuhan utama masyarakat di masa depan diperkirakan tidak terlepas dari hal-hal antara lain : kecukupan pangan yang bergizi,



meningkatnya kualitas kesehatan dan kecerdasan/keterampilan, kemampuan ekonomi yang tinggi, kesejahteraan hidup yang lebih baik, serta adanya rasa aman dan damai yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan kepada pengembangan atau peningkatan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut di atas. Sejalan dengan itu, maka arahan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Tengah ditujukan kepada hal-hal antara lain :

- 1) Pelaksanaan syariat Islam yang kaffah demi terwujudnya masyarakat Aceh Tengah yang islami;
- 2) Pengembangan sektor-sektor ekonomi andalan daerah ini seperti perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, pariwisata, dan industri pengolahan (termasuk industri kerajinan Gayo) dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan usaha, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan ini diharapkan tingkat pendapatan masyarakat dapat meningkat dan kesejahteraan hidup yang lebih baik dapat dicapai;
- 3) Pemanfaatan secara optimal potensi di semua sektor ekonomi melalui pemberian peluang-peluang investasi bagi para calon investor lokal maupun investor asing dengan mengutamakan pada produksi berkualitas ekspor dan penyerahan tenaga kerja lokal yang berketerampilan;
- 4) Pengembangan industri pengolahan yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian menjadi barang jadi yang bermutu. Upaya-upaya ini sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, di samping nilai tambah industri itu sendiri. Kontribusi sektor akan meningkat dan pendapatan perkapita akan turut bertambah;
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, baik teknologi tepat guna maupun teknologi modern. Untuk meningkatkan kemampuan



masyarakat dalam pemanfaatan teknologi, pembangunan juga diarahkan kepada pengembangan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang berkualitas dan modern;

- 6) Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik dan kesejahteraan sosial yang semakin memadai dengan mengantisipasi pertumbuhan penduduk dalam 20 tahun ke depan, serta kebutuhannya yang semakin kompleks, persaingan semakin ketat, dan pencemaran lingkungan yang semakin tinggi;
- 7) Peningkatan kualitas prasarana dan sarana perhubungan serta prasarana/sarana lainnya (listrik dan air minum) guna mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi baik di bidang ekonomi maupun sosial, termasuk mobilitas penduduk yang kian cepat, pasar yang semakin kompetitif, dan arus barang dan jasa yang kian padat; dan
- 8) Penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik agar kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Arahan umum pembangunan jangka panjang selanjutnya dijabarkan oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau dinas/badan/kantor di Kabupaten Aceh Tengah melalui penyusunan program-program perencanaan yang tepat, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan program pembangunan harus mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini. Penetapan program-program pembangunan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di samping juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Selain itu, pelaksanaan program-program prioritas masing-masing SKPD harus didasarkan atas kebutuhan nyata, tepat waktu, berhasil dan bermanfaat, ekonomis dan efektif dengan menjalin



kerjasama lintas SKPD. Seluruh program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD tidak menyimpang dari semua ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran sub Wilayah Pembangunan

Secara umum wilayah pembangunan Kabupaten Aceh Tengah meliputi seluruh sub wilayah yang tergabung dalam daerah Aceh Tengah. Sub wilayah pembangunan adalah wilayah-wilayah kecamatan yang tergabung dalam wilayah pembangunan tertentu, misalnya wilayah pembangunan industri, pertanian, dan/atau wilayah pusat perdagangan atau wilayah-wilayah lainnya. Akan tetapi, dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 disusun secara makro dan bersifat umum yang meliputi pembangunan seluruh sub wilayah yang ada. Disadari bahwa potensi, kondisi dan konfigurasi masyarakat di masing-masing sub wilayah, berbeda antara satu dengan lainnya (*heterogen*). Oleh karena itu, untuk memenuhi seluruh hasrat masyarakat di wilayah-wilayah tersebut diperlukan peranan sub wilayah masing-masing untuk menentukan prioritas pembangunannya sesuai potensi dan kebutuhan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah yang ada guna menghindari ketimpangan pembangunan antar sub wilayah.

Melalui peningkatan peran sub wilayah pembangunan, diharapkan masing-masing sub wilayah pembangunan (pemerintah dan masyarakatnya) benar-benar memiliki tanggung jawab bersama di dalam memajukan wilayahnya. Selain itu, sub wilayah ini dapat membantu pemerintah kabupaten di dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk mendorong percepatan pembangunan masing-masing sub wilayah pembangunan.



**STRATEGI
TAHUN**

2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2024
-----------	-----------	-----------	-----------

(1)	(2)	(3)	(4)
A. EKONOMI DAN SDA	A. EKONOMI DAN SDA	A. EKONOMI DAN SDA	A. EKONOMI DAN SDA
1 Penyediaan kawasan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil (2.500 Ha)	1 Penyediaan kawasan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil (5.000 Ha)	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil dan perkebunan kopi rakyat	1 Membangun pusat-pusat industri pengolahan kopi dan pusat pemasaran
2 Pembangunan kawasan peternakan untuk menampung tenaga kerja mandiri (pola bagi hasil) 600 KK	2 Pembangunan kawasan peternakan untuk menampung tenaga kerja mandiri (pola bagi hasil) 1.200 KK	2 Mengembangkan kawasan peternakan Ketapang sebagai sentra produksi peternakan	2 Mengembangkan kawasan peternakan Ketapang sebagai sentra industri pengolahan produksi peternakan
3 Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	3 Meningkatkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	3 Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan teknologi	3 Meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan perkembangan teknologi



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
4	Melaksanakan program intensifikasi pada usaha pertanian tanaman pangan milik masyarakat, perkebunan kopi rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat	4	Meningkatkan program intensifikasi pada usaha pertanian tanaman pangan milik masyarakat, perkebunan kopi rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat	4	Diversifikasi usaha pertanian tanaman pangan milik masyarakat, perkebunan kopi rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat	4	Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk pertanian tanaman pangan milik masyarakat, perkebunan kopi rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat
5	Membangun dan menata objek-objek wisata untuk menarik wisatawan	5	Meningkatkan penataan objek-objek wisata untuk menarik wisatawan	5	Membangun sarana dan prasarana penunjang objek-objek wisata	5	Mengoptimalkan sektor wisata sebagai sektor unggulan daerah
6	Memfasilitasi pengadaan sarana produksi untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	6	Memfasilitasi pengadaan sarana produksi untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan kuantitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	6	Membangunan pusat-pusat industri pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
7	Rehabilitasi kebun terlantar	7	Rehabilitasi kebun terlantar	7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perkebunan	7	Membangun pusat-pusat industri perkebunan
8	Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan tanaman pangan melalui kegiatan agribisnis	8	Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dan tanaman pangan melalui kegiatan agribisnis	8	Membangun pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan	8	Membangun pusat-pusat pemasaran hasil perkebunan dan tanaman pangan



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
9	Mengefektifkan tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	9	Mengefektifkan tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	9	Meningkatkan sarana dan prasarana bagi tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	9	Meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
10	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak	10	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak	10	Meningkatkan kemampuan petani dan peternak yang profesional	10	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) petani dan peternak yang mandiri
11	Memberdayakan balai benih pertanian, perikanan dan perkebunan daerah	11	Meningkatkan pemberdayaan balai benih pertanian, perikanan dan perkebunan daerah	11	Memproduksi benih pertanian, perikanan dan perkebunan daerah yang berkualitas	11	Meningkatkan produksi benih pertanian, perikanan dan perkebunan daerah yang berkualitas
12	Meningkatkan kemampuan bisnis dan usaha bagi masyarakat	12	Meningkatkan kemampuan bisnis dan usaha bagi masyarakat	12	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) masyarakat yang mandiri	12	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) masyarakat yang mandiri dalam menghadapi era globalisasi



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
13	Melakukan pembinaan terhadap pengusaha industri rumah tangga dan industri kecil	13	Meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha industri rumah tangga dan industri kecil	13	Memberdayakan pengusaha industri rumah tangga dan industri kecil	13	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) masyarakat yang mandiri terhadap industri rumah tangga dan industri kecil
14	Rehabilitasi hutan dan sumber daya alam	14	Rehabilitasi hutan dan sumber daya alam	14	Rehabilitasi hutan dan sumber daya alam	14	Mendayagunakan hutan dan sumber daya alam
15	Mengembangkan berbagai jenis pelatihan/ kursus ketrampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta industri	15	Mengembangkan berbagai jenis pelatihan/ kursus ketrampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta industri	15	Meningkatkan kemampuan petani, peternak dan nelayan yang profesional	15	Mengembangkan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) petani, peternak dan nelayan
16	Memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya pertanian	16	Memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya pertanian	16	Memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya pertanian	16	Memanfaatkan lahan tidur untuk budidaya pertanian
17	Menyalurkan modal usaha dengan pola syari'ah	17	Menyalurkan modal usaha dengan pola syari'ah	17	Menyalurkan modal usaha dengan pola syari'ah	17	Menyalurkan modal usaha dengan pola syari'ah
18	Optimalisasi zakat	18	Optimalisasi zakat	18	Optimalisasi zakat	18	Optimalisasi zakat



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
19	Membantu memfasilitasi permodalan kepada petani dalam bentuk pinjaman bantuan modal usaha/ modal dengan syarat lunak	19	Membantu memfasilitasi permodalan kepada petani dalam bentuk pinjaman bantuan modal usaha/ modal dengan syarat lunak	19	Memberdayakan modal usaha kepada petani dalam bentuk pinjaman modal dengan syarat lunak	19	Memberdayakan modal usaha kepada petani dalam bentuk pinjaman modal dengan syarat lunak yang efektif dan efisien
20	Mendorong perkembangan industri rumah tangga dan industri kecil, dengan memberikan fasilitas kepada para pengusaha dalam bentuk bantuan modal usaha/modal kerja dengan syarat lunak	20	Mendorong perkembangan industri rumah tangga dan industri kecil, dengan memberikan fasilitas kepada para pengusaha dalam bentuk bantuan modal usaha/modal kerja dengan syarat lunak	20	Memberdayakan modal usaha kepada pengusaha dalam bentuk pinjaman modal dengan syarat lunak	20	Memberdayakan modal usaha kepada pengusaha dalam bentuk pinjaman modal dengan syarat lunak yang efektif dan efisien
B. SOSIAL BUDAYA		B. SOSIAL BUDAYA		B. SOSIAL BUDAYA		B. SOSIAL BUDAYA	
1	Melestarikan adat istiadat daerah	1	Meningkatkan pelestarian adat istiadat daerah	1	Meningkatkan pelestarian adat istiadat daerah sebagai salah satu daya tarik kunjungan wisata	1	Menjadikan adat istiadat daerah sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
2	Meningkatkan prasarana olah raga dan pembinaan atlit	2	Meningkatkan prasarana olah raga dan pembinaan atlit	2	Membina cabang olahraga andalan	2	Meningkatkan pembinaan cabang olah raga andalan
3	Meningkatkan SDM masyarakat desa dan kawasan tertinggal	3	Meningkatkan SDM masyarakat desa dan kawasan tertinggal	3	Meningkatkan pemerataan pembangunan pada kawasan tertinggal	3	Meningkatkan status kawasan tertinggal menjadi kawasan yang berkembang
4	Pemberdayaan peran perempuan	4	Meningkatkan pemberdayaan peran perempuan	4	Memanfaatkan sumberdaya perempuan sesuai dengan fitrah dan kodratnya dalam pembangunan masyarakat dan daerah.	4	Mengikutsertakan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan
5	Mengembangkan berbagai jenis pelatihan/ kursus ketrampilan terutama ditujukan bagi anggota masyarakat yang putus sekolah	5	Mengembangkan berbagai jenis pelatihan/ kursus ketrampilan terutama ditujukan bagi anggota masyarakat yang putus sekolah	5	Meningkatkan ketrampilan bagi anggota yang putus sekolah dan memberikan bantuan modal usaha bagi anggota masyarakat terampil yang putus sekolah	5	Memfasilitasi anggota masyarakat terampil untuk menjadi pengusaha mandiri



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
6	Mendirikan sekolah/kelas unggul pada setiap jenjang pendidikan umum/agama	6	Mendirikan sekolah/kelas unggul pada setiap jenjang pendidikan umum/agama	6	Mendirikan sekolah/kelas unggul pada setiap jenjang pendidikan umum/agama	6	Mendirikan sekolah bertaraf internasional
7	Merumuskan dan menerapkan kurikulum pendidikan muatan lokal berdasarkan syari'at Islam	7	Merumuskan dan menerapkan kurikulum pendidikan muatan lokal berdasarkan syari'at Islam	7	Merumuskan dan menerapkan kurikulum pendidikan muatan lokal berdasarkan syari'at Islam	7	Merumuskan dan menerapkan kurikulum pendidikan muatan lokal berdasarkan syari'at Islam
8	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik (guru) dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan	8	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik (guru) dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan	8	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik (guru) dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan	8	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik (guru) dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan
9	Memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan peserta yang berprestasi	9	Memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan peserta yang berprestasi	9	Memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan peserta yang berprestasi	9	Memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan peserta yang berprestasi



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
10	Mengembangkan pendidikan informal, umum dan agama dengan pengembangan pesantren terpadu	10	Mengembangkan pendidikan informal, umum dan agama dengan pengembangan pesantren terpadu	10	Mengembangkan pendidikan informal, umum dan agama dengan pengembangan pesantren terpadu	10	Mengembangkan pendidikan informal, umum dan agama dengan pengembangan pesantren terpadu
11	Meningkatkan fungsi pendidikan kejuruan	11	Meningkatkan fungsi pendidikan kejuruan	11	Meningkatkan fungsi pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi sumber daya daerah	11	Meningkatkan fungsi pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi sumber daya daerah
12	Mendorong pengembangan Perguruan Tinggi Gajah Putih dan STAI	12	Mendorong pengembangan Universitas Gajah Putih dan STAI	12	Memfasilitasi penegerian Universitas Gajah Putih dan STAI	12	Memfasilitasi penegerian Universitas Gajah Putih dan STAI
13	Program bebas biaya SPP untuk sekolah-sekolah negeri guna memberikan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk	13	Program bebas biaya SPP untuk sekolah-sekolah negeri guna memberikan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk	13	Program bebas biaya SPP untuk sekolah-sekolah negeri guna memberikan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk	13	Program bebas biaya SPP untuk sekolah-sekolah negeri guna memberikan kesempatan belajar bagi seluruh penduduk
14	Peningkatan kompetensi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kelulusan	14	Peningkatan kompetensi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kelulusan	14	Peningkatan kompetensi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kelulusan	14	Peningkatan kompetensi tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas kelulusan



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
15	Menyediakan tunjangan khusus kepada tenaga pengajar/ guru dan tenaga administrasi sekolah di daerah terpencil	15	Menyediakan tunjangan khusus kepada tenaga pengajar/ guru dan tenaga administrasi sekolah di daerah terpencil	15	Menyediakan tunjangan khusus kepada tenaga pengajar/ guru dan tenaga administrasi sekolah di daerah terpencil	15	Menyediakan tunjangan khusus kepada tenaga pengajar/ guru dan tenaga administrasi sekolah di daerah terpencil
16	Menyediakan beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi	16	Menyediakan beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi	16	Menyediakan beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi	16	Menyediakan beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi
17	Peningkatan prasarana pendidikan dan alat-alat bantu belajar bagi setiap sekolah	17	Peningkatan prasarana pendidikan dan alat-alat bantu belajar bagi setiap sekolah	17	Peningkatan prasarana pendidikan dan alat-alat bantu belajar bagi setiap sekolah yang berbasis teknologi	17	Peningkatan prasarana pendidikan dan alat-alat bantu belajar bagi setiap sekolah yang berbasis teknologi
18	Pembangunan/penambahan sarana pelayanan kesehatan (Polindes, Pustu dan Puskesmas)	18	Pembangunan/penambahan sarana pelayanan kesehatan (Polindes, Pustu dan Puskesmas)	18	Pembangunan dan peningkatan status sarana pelayanan kesehatan (Polindes, Pustu dan Puskesmas)	18	Pembangunan dan peningkatan status sarana pelayanan kesehatan (Polindes, Pustu dan Puskesmas)
19	Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke tingkat kampung	19	Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke tingkat kampung	19	Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke tingkat kampung	19	Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai ke tingkat kampung



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
20	Pengadaan tenaga dokter spesialis	20	Pengadaan tenaga dokter spesialis	20	Pengadaan tenaga dokter spesialis	20	Pengadaan tenaga dokter spesialis
21	Peningkatan status Rumah Sakit Umum Datu Beru dari tipe C menjadi tipe B sehingga menjadi Rumah Sakit rujukan bagi daerah tetangga kabupaten	21	Peningkatan status Rumah Sakit Umum Datu Beru dari tipe C menjadi tipe B sehingga menjadi Rumah Sakit rujukan bagi daerah tetangga kabupaten	21	Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Datu Beru sebagai Rumah Sakit rujukan	21	Meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Datu Beru sebagai Rumah Sakit rujukan
22	Peningkatan ketrampilan tenaga medis	22	Peningkatan ketrampilan tenaga medis	22	Peningkatan ketrampilan tenaga medis	22	Peningkatan ketrampilan tenaga medis
23	Peningkatan fasilitas kesehatan pada RSU Datu Beru yang berbasis teknologi	23	Peningkatan fasilitas kesehatan pada RSU Datu Beru yang berbasis teknologi	23	Peningkatan fasilitas kesehatan pada RSU Datu Beru yang berbasis teknologi	23	Peningkatan fasilitas kesehatan pada RSU Datu Beru yang berbasis teknologi
24	Pendirian dan peningkatan institusi pendidikan kesehatan	24	Pendirian dan peningkatan institusi pendidikan kesehatan	24	Pendirian dan peningkatan institusi pendidikan kesehatan	24	Pendirian dan peningkatan institusi pendidikan kesehatan
25	Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil	25	Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil	25	Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil	25	Pemberian tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
26	Program bebas biaya memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis di setiap pusat kesehatan	26	Program bebas biaya memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis di setiap pusat kesehatan	26	Program bebas biaya memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis di setiap pusat kesehatan	26	Program bebas biaya memperoleh pelayanan kesehatan dasar gratis di setiap pusat kesehatan
27	Peningkatan kunjungan dokter ke kampung-kampung dan kawasan terpencil	27	Peningkatan kunjungan dokter ke kampung-kampung dan kawasan terpencil	27	Peningkatan kunjungan dokter ke kampung-kampung dan kawasan terpencil	27	Peningkatan kunjungan dokter ke kampung-kampung dan kawasan terpencil
C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA	
1	Menyusun dokumen perencanaan revisi tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Menyusun dokumen perencanaan revisi tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Revisi dokumen tata ruang wilayah, kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Memantapkan, memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang
2	Menyusun dokumen perencanaan master plan infrastruktur dan pariwisata	2	Menyusun dokumen perencanaan master plan infrastruktur dan pariwisata secara Sistem Informasi Geografis (SIG)	2	Menyusun dokumen perencanaan master plan infrastruktur kawasan perkotaan kecamatan	2	Membangun infrastruktur kawasan perkotaan



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
3	Menyusun dokumen perencanaan teknis infrastruktur dan pariwisata	3	Menyusun dokumen perencanaan teknis infrastruktur dan pariwisata	3	Revisi dokumen perencanaan teknis sesuai dengan perkembangan teknologi	3	Membangun infrastruktur kawasan agropolitan dan kawasan andalan
4	Menyusun dan menetapkan peraturan hukum tentang rencana tata ruang, rencana induk infrastruktur dan pariwisata	4	Menyusun dan menetapkan peraturan hukum tentang rencana tata ruang, rencana induk infrastruktur dan pariwisata	4	Menyusun dan menetapkan peraturan hukum tata ruang, rencana induk infrastruktur dan pariwisata	4	Menangani kawasan kumuh perkotaan
5	Membangun sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan guna mempercepat pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh (sentra-sentra produksi)	5	Membangun sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan guna mempercepat pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh (sentra-sentra produksi)	5	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan untuk menunjang perekonomian masyarakat	5	Memelihara dan memantapkan kualitas dan sarana wilayah serta perkotaan guna menghadapi persaingan ekonomi global
6	Monitoring dan evaluasi	6	Monitoring dan evaluasi	6	Monitoring dan evaluasi	6	Monitoring dan evaluasi



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
D. AGAMA		D. AGAMA		D. AGAMA		D. AGAMA	
1	Memberantas segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Memberantas segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Memberantas segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Memberantas segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf
2	Menumbuhkan pusat-pusat pengajian untuk berbagai golongan usia penduduk	2	Menumbuhkan pusat-pusat pengajian untuk berbagai golongan usia penduduk	2	Menumbuhkan pusat-pusat pengajian untuk berbagai golongan usia penduduk	2	Menumbuhkan pusat-pusat pengajian untuk berbagai golongan usia penduduk
3	Memberikan penyuluhan agama dan qanun syari'at Islam/ meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam seperti diatur dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3	Memberikan penyuluhan agama dan qanun syari'at Islam/ meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam seperti diatur dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3	Memberikan penyuluhan agama dan qanun syari'at Islam/ meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam seperti diatur dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3	Memberikan penyuluhan agama dan qanun syari'at Islam/ meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam seperti diatur dalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4	Peningkatan materi dan metode dakwah	4	Peningkatan materi dan metode dakwah	4	Peningkatan materi dan metode dakwah	4	Peningkatan materi dan metode dakwah
5	Peningkatan kesejahteraan da'i, imam kampung, imam mesjid dan Wilayatul Hisbah	5	Peningkatan kesejahteraan da'i, imam kampung, imam mesjid dan Wilayatul Hisbah	5	Peningkatan kesejahteraan da'i, imam kampung, imam mesjid dan Wilayatul Hisbah	5	Peningkatan kesejahteraan da'i, imam kampung, imam mesjid dan Wilayatul Hisbah



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
6	Penyelenggaraan pengkajian kandungan Al Qur'an dan pengajian (TPQ) disetiap mesjid	6	Penyelenggaraan pengkajian kandungan Al Qur'an dan pengajian (TPQ) disetiap mesjid	6	Penyelenggaraan pengkajian kandungan Al Qur'an dan pengajian (TPQ) disetiap mesjid	6	Penyelenggaraan pengkajian kandungan Al Qur'an dan pengajian (TPQ) disetiap mesjid
7	Peningkatan penyelenggaraan haji	7	Peningkatan penyelenggaraan haji	7	Peningkatan penyelenggaraan haji	7	Peningkatan penyelenggaraan haji
E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN	
1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	1	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan
2	Melaksanakan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	2	Melaksanakan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	2	Melaksanakan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	2	Melaksanakan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
3	Mengaplikasikan perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada perencanaan dari bawah (<i>bottom up planning</i>)	3	Mengaplikasikan perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada perencanaan dari bawah (<i>bottom up planning</i>)	3	Mengaplikasikan perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada perencanaan dari bawah (<i>bottom up planning</i>)	3	Mengaplikasikan perencanaan pembangunan dengan mengacu kepada perencanaan dari bawah (<i>bottom up planning</i>)
4	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	4	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	4	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	4	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah
5	Penataan kearsipan pemerintah daerah	5	Penataan kearsipan pemerintah daerah	5	Penataan kearsipan pemerintah daerah	5	Penataan kearsipan pemerintah daerah
6	Diklat dan penyediaan kredit usaha bagi korban konflik	6	Diklat dan penyediaan kredit usaha bagi korban konflik				
7	Percepatan terwujudnya proses reintegrasi	7	Percepatan terwujudnya proses reintegrasi				
8	Menuntaskan pembangunan rumah terbakar akibat konflik	8	Menuntaskan pembangunan rumah terbakar akibat konflik				
9	Diklat dan penyediaan kredit usaha bagi korban konflik	9	Diklat dan penyediaan kredit usaha bagi korban konflik				



KEBIJAKAN TAHUN

2005-2009		2010-2014		2015-2019		2020-2024	
(1)		(2)		(3)		(4)	
A. BIDANG EKONOMI DAN SDA		A. BIDANG EKONOMI DAN SDA		A. BIDANG EKONOMI DAN SDA		A. BIDANG EKONOMI DAN SDA	
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
2	Program kawasan khusus/terpadu	2	Program kawasan khusus/terpadu	2	Program kawasan khusus/terpadu	2	Program kawasan khusus/terpadu
3	Peningkatan produksi pertanian/industri	3	Peningkatan produksi pertanian/industri	3	Peningkatan produksi pertanian/industri	3	Peningkatan produksi pertanian/industri
4	Penyediaan/pemasaran hasil-hasil produksi	4	Penyediaan/pemasaran hasil-hasil produksi	4	Penyediaan/pemasaran hasil-hasil produksi	4	Penyediaan/pemasaran hasil-hasil produksi
B. BIDANG SOSIAL BUDAYA		B. BIDANG SOSIAL BUDAYA		B. BIDANG SOSIAL BUDAYA		B. BIDANG SOSIAL BUDAYA	
1	Program-program pemberdayaan masyarakat	1	Program-program pemberdayaan masyarakat	1	Program-program pemberdayaan masyarakat	1	Program-program pemberdayaan masyarakat
2	Program-program pemenuhan kebutuhan dasar	2	Program-program pemenuhan kebutuhan dasar	2	Program-program pemenuhan kebutuhan dasar	2	Program-program pemenuhan kebutuhan dasar



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
3	Pengembangan sistem jaminan sosial	3	Pengembangan sistem jaminan sosial	3	Pengembangan sistem jaminan sosial	3	Pengembangan sistem jaminan sosial
C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA		C. SARANA DAN PRASARANA	
1	Penyusunan dokumen perencanaan revisi tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Penyusunan dokumen perencanaan revisi tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Pelaksanaan revisi dokumen tata ruang wilayah, kabupaten dan rencana rinci tata ruang	1	Pemantapan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
2	Penyusunan dokumen perencanaan master plan infrastruktur dan pariwisata	2	Penyusunan dokumen perencanaan master plan infrastruktur dan pariwisata secara Sistem Informasi Geografis (SIG)	2	Penyusunan dokumen perencanaan master plan infrastruktur kawasan perkotaan kecamatan	2	Pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan
3	Penyusunan dokumen perencanaan teknis infrastruktur dan pariwisata	3	Penyusunan dokumen perencanaan teknis infrastruktur dan pariwisata	3	Pelaksanaan revisi dokumen perencanaan teknis sesuai dengan perkembangan teknologi	3	Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan dan kawasan andalan



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
4	Penyusunan dan penetapan peraturan hukum tentang rencana tata ruang, rencana induk infrastruktur dan parawisata	4	Penyusunan dan penetapan peraturan hukum tentang rencana tata ruang, rencana induk infrastruktur dan parawisata	4	Penyusunan dan penetapan peraturan hukum tata ruang, rencana induk infrastruktur dan parawisata	4	Penanganan kawasan kumuh perkotaan
5	Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan guna mempercepat pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh (sentra-sentra produksi)	5	Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan guna mempercepat pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh (sentra-sentra produksi)	5	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta perkotaan yang berwawasan lingkungan untuk menunjang perekonomian masyarakat	5	Pemeliharaan dan pemantapan kualitas dan sarana wilayah serta perkotaan guna menghadapi persaingan ekonomi global
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
D. AGAMA		D. AGAMA		D. AGAMA		D. AGAMA	
1	Pemberantasan segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Pemberantasan segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Pemberantasan segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf	1	Pemberantasan segala bentuk perbuatan mungkar dan mengarahkannya perbuatan ma'ruf
2	Pelaksanaan Syariat Islam	2	Pelaksanaan Syariat Islam	2	Pelaksanaan Syariat Islam	2	Pelaksanaan Syariat Islam
E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN		E. PEMERINTAHAN	
1	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	1	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	1	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah	1	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan penyelenggara pemerintah daerah
2	Penataan kearsipan pemerintah daerah	2	Penataan kearsipan pemerintah daerah	2	Penataan kearsipan pemerintah daerah	2	Penataan kearsipan pemerintah daerah



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025**

(1)		(2)		(3)		(4)	
3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan	3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan setiap program pembangunan
4	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	4	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	4	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan	4	Peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui diklat wawasan kebangsaan



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 ini disusun secara komprehensif dan bersifat makro. Dokumen perencanaan yang bersifat makro memberikan gambaran umum setiap sektor pembangunan, berikut permasalahan, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang akan ditempuh untuk 20 tahun ke depan. Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro ini diharapkan dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Oleh karena itu, RPJP ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten di masa depan. Selain itu, RPJP ini juga sebagai koridor dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah untuk lima tahun ke depan (2007-2012), termasuk untuk pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten), Rencana Kerja SKPK, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan lainnya.

